**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN TABUNG GAS ELPIJI**

**( Studi Kasus Putusan No. 150/Pid.B/2012/PN.Ung. )**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Srata Satu (S-1) Program Kekhususan Hukum Pidana



**Diajukan Oleh :**

**Diah Palupi Septianingsih**

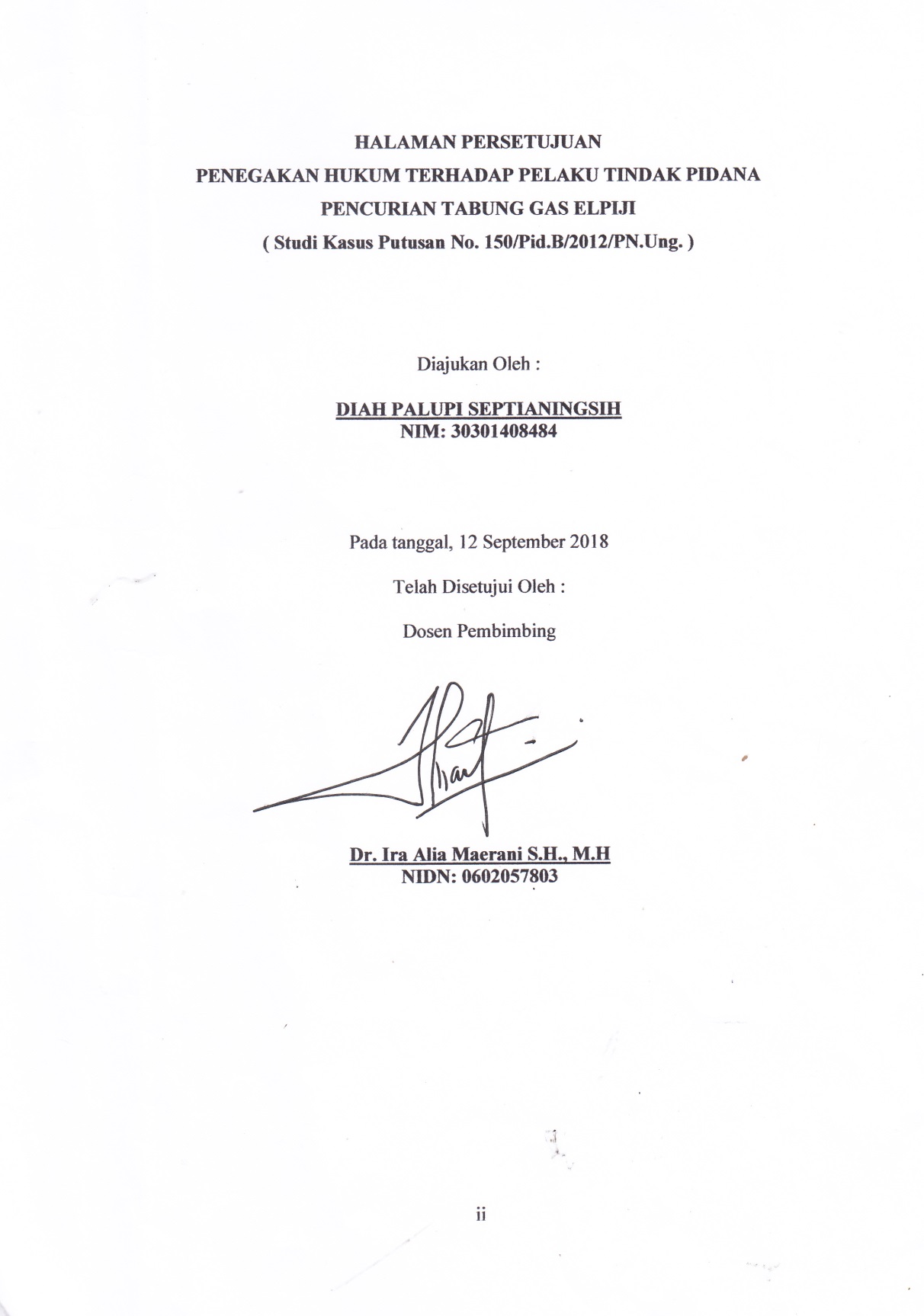
**NIM : 30301408484**

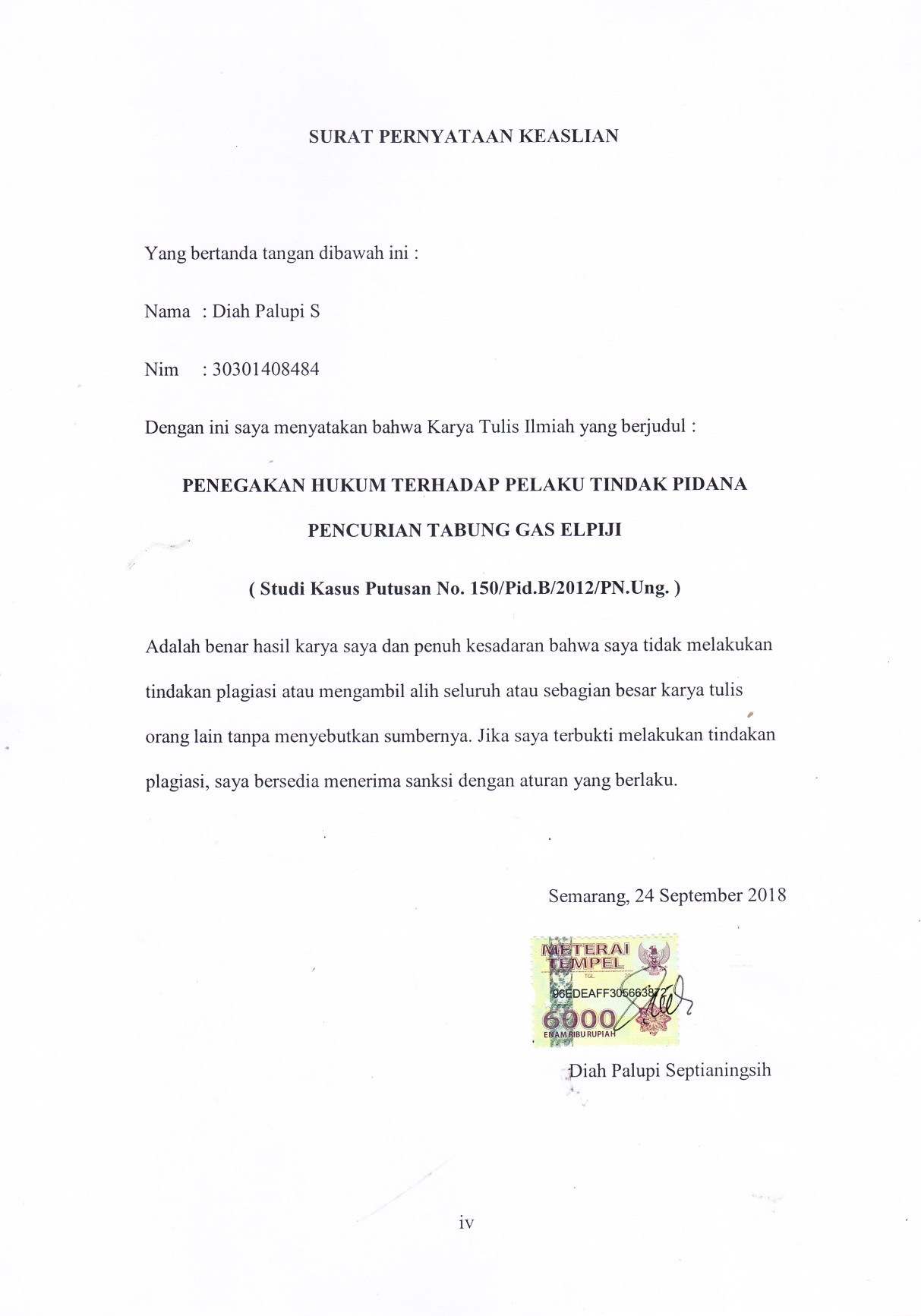
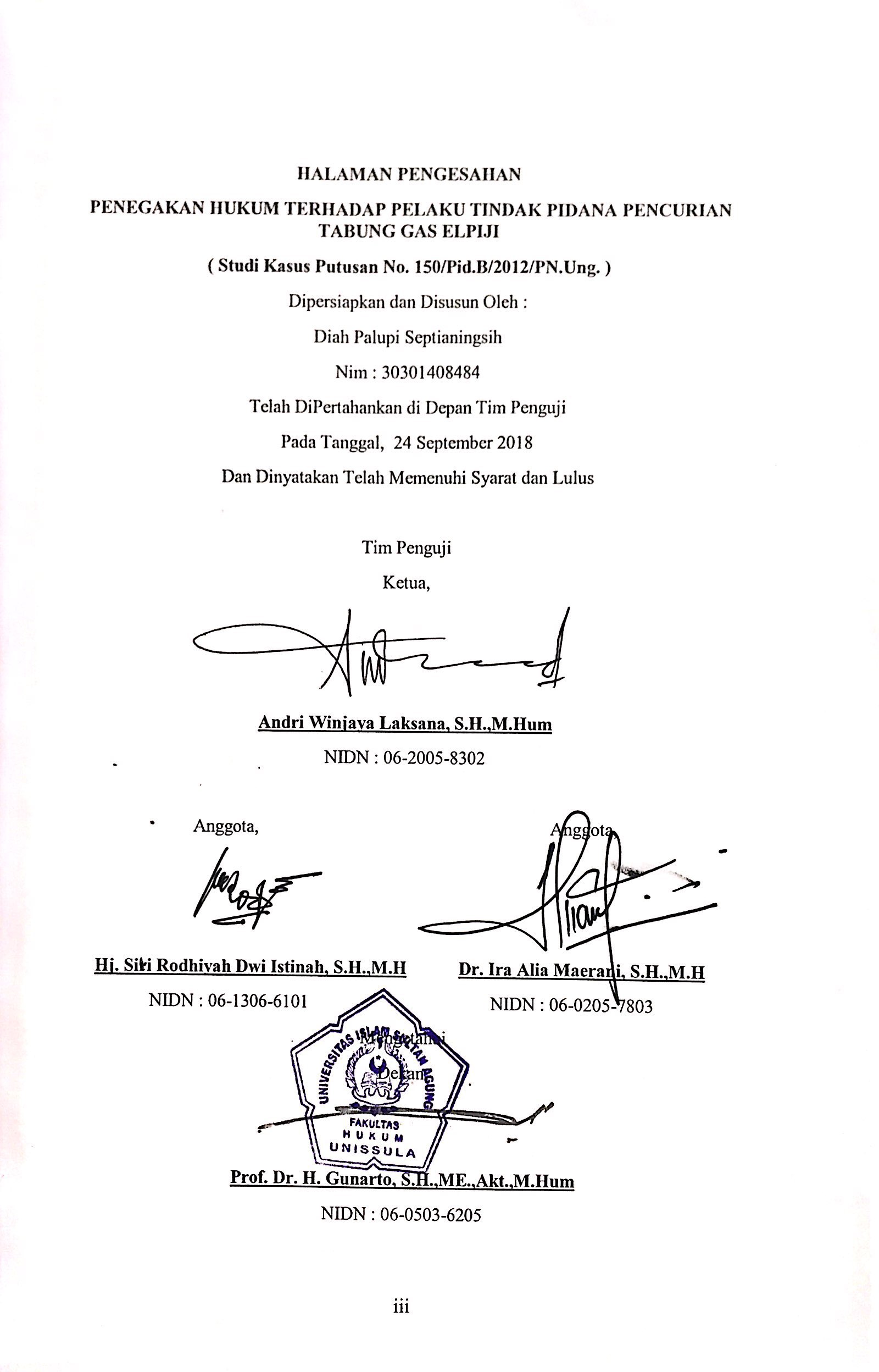
**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SULTAN AGUNG ( UNISSULA )**

**SEMARANG**

**2018**





**MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“ FA MAY YA’MAL MINAS-SALIHATI WA HUWA MU’MINUN FA LA KUFRANA LISA’YIH, WA INNA LAHU KATIBUN “

Barangsiapa mengerjakan kebajikan dan dia beriman, maka usahanya tidak akan diingkari (disia-siakan) dan sungguh, Kamilah yang mencatat untuknya

( Al – Anbiya’ : 94 )

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

* ALLAH SWT dan Rasulullah SAW
* Bapak dan Ibuku yang tercinta
* Kakak-Kakakku Tercinta
* Saudara – saudara juga Teman – Temanku
* Almamaterku

**KATA PENGANTAR**

**بِسْــــــــــــــــــمِاللهِالرَّحْمَنِالرَّحِيْمِ**

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah segala puji syukur ucapkan bagi Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan baik dan lancar yang berjudul “**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Tabung Gas Elpiji ( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Ungaran Kab. Semarang Studi Kasus Putusan No. 150/Pid.B/2012/Pn.Ung. )”** dengan maksud untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum ( S1 ) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini tidaklah mudah bagi penulis untuk menyelesaikan, butuh keuletan dan manajemen waktu agar dapat menyelesaikan tepat waktu. Sebagai manusia biasa penulis juga tidak luput dari kesalahan dan kekurangan serta keterbatasan tentang pengetahuan, sehingga penulis menyadari bahwa dalam penyusunan kata – kata dan juga dalam materi masih jauh dari sempurna sesuai yang diharapkan. Namun penulis sangat berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak, tanpa mereka skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana mestinya sekarang. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis inginn mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam – dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini baik dalam lingkungan moril maupun materiil. Penulis menyampaikan terimakasih sebesar - besarnya kepada :

1. Ir. H. Prabowo Setiyawan, M.T., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E, Akt.M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati S.H, M.H. selaku Dekan I dan Bapak Arpangi S.H, M.H selaku Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Sri Endah Wahyuningsih S.H, M.H. selaku Dosen Wali selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Dr. Ira Alia Maerani S.H, M.H. selaku Dosen Pembinbing yang senantiasa meluangkan waktunya, dan dengan sabar membimbing memberikan ilmu, arahan dan juga dukungan hingga penulisan skripsi ini selesai.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang yang memberikan banyak ilmu semasa kuliah hingga selesai.
7. Segenap staf dan kariyawan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang yang selalu memberikan pelayanan terbaik jika penulis membutuhkan sesuatu mengenai perkuliahan.
8. Bapak Anis Jundrianto, S.H. selaku Panitera Muda Urusan Hukum di Pengadilan Negeri Ungaran yang telah membantu memberi izin dalam melakukan penelitian.
9. Bapak Wasis Priyanto S.H, M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Ungaran yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi data yang dibutuhkan.
10. Orang tua tercinta Bapak Edi Wuryanto dan Ibu Diah Purwati Kurnianingsih yang selalu tidak berhenti mendoakan, memberikan dukungan semangat, kasih sayang dan motivasi baik secara moril dan materiil.
11. Saudari – saudariku tersayang Diah Ayu Septianingsih dan Heni Diah Pujiastuti yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
12. Teman – teman terdekat diluar lingkungan kampus yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
13. Teman – teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2014 Universitas Sultan Agung Semarang yang tidak dapat disebutkan satu – persatu terimakasih atas bantuan, dan kesan – kesan selama ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna karna terbatasanya ilmu pengetahuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat dibutuhkan bagi penulis agar menjadi masukan.

Akhirnya penulis ucapkan Terimakasih kepada para pihak yang membantu dalam penyelesaian skripi ini, semoga mendapat balasan rahmat Allah SWT dan berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pihak yang membutuhkan. Amin ya Rabbal a’lamin.

*Waalaikumsalam Wr. Wb*

Semarang, 31Agustus 2018

Diah Palupi Septianingsih

# ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana pencurian yang diatur dalam hukum pidana positif saat ini, proses pemidanaan tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Ungaran Kabupaten Semarang, dan untuk mengetahui kendala serta langkah penyelesaian hukumnya.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, dengan teknik pengumpulan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yaitu data primer yang kemudian didukung dengan data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Negeri Ungaran. Kemudian untuk spesifikasi penulisan menggunakan analis kualitatif. Peneliti juga melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku - buku, literatur dan perundang– undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: berdasarkan hasil dari pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menerapkan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun. Majelis Hakim menemukan bahwa Terdakwa benar melakukan tindak pidana pencurian. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi Pidana dalam perkara pencurian Tabung Gas Elpiji dengan Nomor 150/Pid.B/2012/PN.Ung. adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum, barang bukti, keterangan saksi–saksi, keterangan terdakwa, hal–hal yang memberatkan dan juga hal–hal yang meringankan bagi Terdakwa mengingat sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dan pertimbangan non-yuridis berdasarkan fakta fakta yang terungkap selama persidangan. Dalam proses persidangan terdapat kendala-kendala antara lain sulitnya menghadirkan saksi dalam persidangan dan terdakwa tidak mau memberi keterangan atau sulit untuk diajak berkomunikasi.

**Kata Kunci**: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pencurian

**ABSTRACT**

*This study aims to find out the crime of theft that is regulated in the current positive criminal law, the process of criminal acts of theft in the District Court of Ungaran, Semarang Regency, and to find out the obstacles and steps of legal settlement.*

*This study uses a sociological juridical method, with data collection techniques based on the results of field studies, namely primary data which is then supported by secondary data obtained from the results of direct interviews with Ungaran District Court Judges. Then for writing specifications using qualitative analysts. Researchers also study literature by examining books, literature and legislation related to the problems discussed in this thesis.*

*The findings obtained from this study include: based on the results of the hearings in the trial, the Panel of Judges applied Article 363 Paragraph (1) to the 4th and 5th of the Criminal Code to the defendant with a 1 (one) year imprisonment. The Panel of Judges found that the Defendant was right to commit a crime of theft. Judges consider in imposing a criminal sanction in the case of LPG Gas Cylinder theft with Number 150 / Pid.B / 2012 / PN.Ung. is the Prosecutor's indictment, evidence, witness testimony, statement of the defendant, aggravating matters as well as matters which alleviate the Defendant given that the Defendant has previously been convicted and non-juridical considerations based on facts revealed during the trial. In the trial process there were obstacles, including the difficulty of presenting witnesses at the trial and the defendant did not want to give information or was difficult to communicate with.*

*Keywords: Law Enforcement, Crime, Thef*

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ………………………………………….………………. i

HALAMAN PERSETUJUAN …………………………………………….….. ii

HALAMAN PENFGESAHAN ………………………………………………. iii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ………………………………………. iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN...................................................................... v

KATA PENGANTAR ……………………………………………………….. vi

ABSTRAK ......................................................................................................... x

ABSTRACT ...................................................................................................... xi

[BAB I](#_Toc523489691) [PENDAHULUAN](#_Toc523489692) ……………………………………………………... 1

A. Latar Belakang Masalah ………………………………………………. 1

B. Rumusan Masalah ……………………………………………………... 10

C. Tujuan Penelitian ................................................................................... 10

D. Kegunaan Penelitian ……………………………………………………. 11

E. Terminologi …………………………………………………….……….. 12

[F. Metode Penelitian …………………………………………….…………. 13](#_Toc523489700)

I. Sistematika Penulisan Hukum ……………………………….………….. 18

[BAB II](#_Toc523489749) TINJAUAN PUSTAKA ……………………………….….…………… 21

A. Tindak Pidana ……………………………………………….…………... 21

1. Pengertian Tindak Pidana …………….………………….…………… 21

2. Jenis - Jenis Tindak Pidana …………………………….……………... 33

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana …………………………………….……. 40

B. Pencurian ………………………………………………………………... 45

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian ……………………………….… 45

2. Jenis dan Unsur Tindak Pidana Pencurian ………………………....… 46

C. Pemidanaan ……………...…………………………………………….... 59

1. Pengertian Pemidanaan ………………………………………………. 59

2. Teori Pemidanaan ………………………………………………….…. 61

3. Jenis dan Sanksi Tindak Pidana ……………………………………… 65

D. Pengertian Elpiji ………………………………………………………… 69

E. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Islam ………….. 76

[BAB III](#_Toc523489775) PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN ……………………......81

A. Hukum Tindak Pidana Pencurian dalam Pidana Positif saat ini ….….. 81

[B Proses pemidanaan pelaku Tindak Pidana pencurian tabung Gas LPG di Pengadilan Negeri Ungaran Kab. Semarang (Studi Putusan NO. 150/Pid.B/2012/PN.Ung ...............................................................................](#_Toc523489779) 83

C. Kendala-Kendala yang dihadapi dalam Persidangan dan Solusinya….126

BAB IV PENUTUP …………………………………………………………... 129

A. Kesimpulan ………………………………………………….………. 129

B. Saran …………………………………………………………….…... 131

[DAFTAR PUSTAKA](#_Toc523489807)  132

# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia seperti yang kita ketahui merupakan negara Hukum sebagaimana yang diataur dalam Undang - Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar secara jelas dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtaat*).[[1]](#footnote-1)Konsep Negara Hukum sendiri selain bermakna bukan Negara Kekuasaan juga mengandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supermasi hukum dan konstitusi dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam undang-undang dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam undang-undang dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak dan menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh wewenang pihak yang berkuasa.[[2]](#footnote-2)

Hukum sendiri merupakan suatu aturan yang tidak dapat lepas dari kehidupan sehari-hari, hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antar manusia yang satu dengan yang lainnya dan sebagai penghubung antara manusai dengan Negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karna itu hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan didalam masyarakat.

Menurut Achmad Ali hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidka boleh dilakukan manusia sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat sendriri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat sebagai satu keseluruhan dalam kehidupan. Apabila kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.[[3]](#footnote-3)

Dari berbagai macam pembahasan ilmu hukum yang sudah ada, salah satu kajian ilmu hukum yang penting yaitu Hukum Pidana.Disamping Hukum Pidana merupakan salah satu kajian terpenting, tetapi hukum pidana juga merupakan salah satu hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum Pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sangsi (Sic) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi hukuman pidana sebagaimana diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.[[4]](#footnote-4)

Suatu kenyataan bahwa manusia tidak hidup sendiri. Manusia hidup berdampingan bahkan juga berkelompok dan seiring mengadakan hubungan antar sesama. Hubungan ini terjadi berkenan dengan kebutuhan hidup yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam. Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang diperoleh melalui daya upaya yang dilakukan untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin.[[5]](#footnote-5) Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran untuk berperilaku sesuai dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat yang diwujudkan dengan cara bertingkah laku sesuai dengan norma yang sudah diberlakukan.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat bahkan negara.[[6]](#footnote-6)

Seiring perkembangan teknologi serta zaman yang semakin maju dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat, maka tanpa disadari mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Kriminalitas atau kejahatan dalam berbagai bentuk dan pola baik secara kuantitas maupun kualitas yang memberikan dampak negatif terhadap pelaksanaan pembangunan Negara, karena seperti yang kita tahu Negara Indonesia kini sedang dalam proses membangun dan proses pembangunan ini dilakukan secara bertahap untuk kelangsungan hidup masyarakat. Maka peran masyarakat sangat penting bagi proses pembangunan Negara Inonesia.

Kejahatan atau kriminalitas merupakan suatu perbuatan yang menyimpang yang mempunyai sifat yang tercelah sehingga perbuatan ini sering menimbulkan sanksi sosial dalam masyarakat. Beberapa perbutan atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum serta menganggu ketenangan dan keserasian hidup bersama, salah satunya adalah kejahatan pencurian.

Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindakan pidana yang paling sering terjadi, banyaknya pemberitaan di media massa baik itu media elektronik maupun media cetak. Tindak pidana pencurian biasanya dilatarbelakangi oleh keadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya yang tergolong rendah sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan biaya hidup sehari-hari. Pencurian adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat, berbagai upaya dilakukan pemerintah baik pihak berwajib maupun wagra masyarakat sendiri untuk menghapusnya tetapi upaya tersebut tidak mungkin akan terwujud secara keseluruhan karena setiap kejahatan tidak akan dapat dihapuskan dengan mudah melainkan hanya dapat dikurangi tingkat intensitasnya.

Di Indonesia tindak pidana pencurian kini semakin marak terjadi, hal itu tentu terjadi karena adanya beberapa aspek dan khususnya yaitu aspek perekonomiansedangkan sekarang ini semakin sulitnya mencari pekerjaan karena semakin sempitnya lapangan pekerjaan sehingga tidak dapat menampung masyarakat Indonesia untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan yang tetap maka dari itu banyak masyarakat yang bersaing untuk mendapatkan pekerjaan agar dapat memenuhi kenbutuhan sehari – hari, bagi yang kalah bersaing atau tidak mendapatkan pekerjaan bukan tidak mungkin mereka akan melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya. Tindak pidana pencurian adalah suatu perbuatan yang melanggar norma-norma pokok atau dasar hidup masyarakat, yaitu dikategorikan dalam norma hukum dan norma agama.

Dalam agama manapun juga dijelaskan jika mencuri berarti mengambil sesutau milik orang lain tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya secara sah. Mencuri terdapat berbagai macam bentuknya, yaitu mencuri barang, berampok, korupsi harta dan waktu, penyelewengan jabatan dan lain-lain. Mencuri merupakan suatu perbuataan yang dilarang karena hal tersebut merupakan dosa besar seperti yang dijelaskan pada surat Al-Maidah ayat 38-40 mengenai perbuatan mencuri.

### وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (39) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (40)

### Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglahtangankeduanya (sebagai) pembalasandariapa yang merekakerjakan dan sebagaisiksaandari Allah. Dan Allah MahaperkasalagiMahabijaksana. (QS. 5:38)Makabarangsiapabertaubat(diantarapencuri-pencuriitu) sesudahmelakukankejahatanitu, dan memperbaikidiri, makasesungguhnya Allah menerimataubatnya. Sesungguhnya Allah MahapengampunlagiMaha-penyayang. (QS.5:39) Tidakkahkamutahu, sesungguhnyaAllahlah yang mempunyaikerajaanlangit dan bumi, disiksa-Nya siapa yang dikehendaki-Nya, dan diampuni-Nya bagisiapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Mahakuasaatassegalasesuatu. (QS. 5:40)”  (al-Maa-idah: 38-40)[[7]](#footnote-7)

Pencurian tidak hanya menarik perhatian dari para penegak hukum tetapi juga meresahkan masyarakat, dan juga merugikan para pihak yang menjadi korban atau sasarannya. Para pelaku tindak kejahatan tidak hanya dilakukan oleh perorangan tak banyak yang melakukan secara kelompok yang sudah berpengalaman. Tak sedikit dari mereka yang melakukan aksinya disertai kekerasaan, pemaksaan dan lain-lain. Mereka terbilang dapat nekat demi mendapatkan keuntungan tanpa pikir panjang. Hal ini tentu membuat masyarakat sangat khawatir dan tidak tenang karena takut jika menjadi sasaran para pelaku ini karena sudah banyak yang menjadi korban dari pencurian dalam berbagaimacam bentuk. Para pelaku pencurian tidak hanya mengincar harta benda terkadang nyawapun juga menjadi taruhannya. Karena semakin kurangnya lapangan pekerjaan hal ini merupakan salah satu jalan pintas bagi mereka, pelaku tindak pidana dapat menghalalkan segala cara demi melancarkan aksinya dan mendapatkan keuntungan.

Pada tahun 2007 pemerintah mulai gencar-gencarnya melakukan sosialisasi agar masyarakat beralih dari minyak tanah ke Gas Elpiji, gas Elpiji sedndiri merupakan campuran dari berbagai unsur hidrokarbon yang berasal dari gas alam. Awalnya tentu banyak masyarakat yang mengeluh namun semakin sulitnya dan semakin tingginya harga minyak tanah mau tidak mau masyarakat mulai beralih ke tabung gas elpiji karena harganya yang terjangkau dibanding harga minyak tanah yang semakin melambung tinggi. Pemerintah yang awalnya menyediakan gas Elpiji berukuran 12kg kini pemerintah juga menyediakan gas Elpiji 3kg yang disediakan untuk masyarakay menengah kebawah karena Gas 3kg terbilang sangat murah harganya yang terjangkau membuat masyarakat memilih menggunakan Gas 3kg dan Gas 12kg sebagai pelengkap atau masyarakat yang berminat karena Gas 12kg harganya terbilang sangat mahal sesuai dengan kapasitas yang ada. Beralihnya minyak tanah ke gas Elpiji tentu saja memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu, hal ini membuat tak sedikit masyarakat menjadikan hal ini sebagai peluang usaha untuk menjadi agen besar atau pedagang gas Elpiji kecil-kecilan guna untuk mendistribusikan gas ke para konsumen akhir yaitu rumah tangga dan mikro mengingat minyak tanah kini semakin langka. Tentu saja usaha sebagai penyalur Gas Elpiji ke konsumen ini sangat mengiurkan karena 99% masyarakat kini sudah menggunakan gas Elpiji dan pasti banyak yang membutuhkan jasa para penyedia gas Elpiji sebagai penyalur agar dengan mudah mendapatkan Gas Elpiji untuk kebutuhan sehari-hari.

Dampak negatif dari konversi ini adalah harga tabung gas yang terbilang mengiurkan membuat para pelaku tindak kejahatan menjadikan peluang untuk usaha tanpa perlu adanya modal. Sekarang ini banyak orang yang nekat mencuri tabung Gas Elpiji dan kemudian diperjual-belikan lagi. Tentu saja keuntungannya sangat banyak, jika 1 tabung gas Elpiji kosong 3kg dijual seharga Rp. 115.000,- dan 1 tabung gas Elpiji 12kg kosong dijual seharga Rp. 250.000,- jika mereka dapat mengambil lebih dari satu tabung 3kg dan 12kg sudah berapa banyak merka mendapat keuntungan. Hal ini terkadang dilakukan bukan saja oleh perorangan bahkan sudah ada suatu kelompok yang sudah sering atau berpengalaman dalam melakukan aksinya hal ini mereka lakukan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Para pelaku ini tidak hanya membururumah-rumah warga, kios kecil atau warung-warung tetapi juga ke agen-agen bahkan bisa saja ke perusahaan yang besar karena semakin banyak mereka mendapatkan tabung Gas semakin banyak juga keuntungan yang mereka dapatkan.

Hal ini tentu saja tidak hanya terjadi di Ungaran saja, di Yogyakarta Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polsek Jetis mengamankan seorang pria yang mencuri tabung gas isi 3 kilogram di sebuah warung susu kedelai yang berlokasi di daerah Jetis beberapa hari lalu. Adapun pelaku yang berhasil diamankan bernama Librianto Wusono alias Yanto (53), warga Jetis, Yogyakarta.

Kapolsek Jetis, Kompol Hariyanto melalui Kanit Reskrimnya, Iptu Muzaki mengatakan, selain mengamankan pelaku, pihaknya juga menyita barang bukti dari tangan pelaku berupa tabung gas yang dicuri, satu unit sepeda motor, dan obeng yang digunakan pelaku dalam aksi pencuriannya. "Kami sita 2 tabung gas isi 3 kg, satu motor nomor polisi AB 2075 KH yang dipakai pelaku, dan sebuah obeng dengan panjang 13 cm dari tangan pelaku," katanya, Rabu (18/10/2017).

Sambungnya, dalam melakukan aksinya pelaku terbilang nekat, hal tersebut dikarenakan pelaku melakukan aksinya di pagi hari dan dengan cara mencongkel pintu warung. Sebelum melakukan aksinya, pelaku juga sempat mengamati suasana sekitar lokasi kejadian.

"Kejadiannya sekitar jam 5 pagi, jadi usai memastikan warung itu dalam keadaan sepi, pelaku langsung mencongkel gembok di pintu warung itu dengan obengnya. Setelah pintu terbuka dia masuk, melihat ada 2 tabung gas langsung diambilnya. Setelah itu pelaku pergi dengan sepeda motor, ketika korban hendak membuka warungnya ia mendapati pintu dalam keadaan terbuka. Korban pun lantas melaporkan hal tersebut ke pihaknya. Tak berselang lama pihaknya mendapat laporan jika pelaku dimassa warga dan akhirnya pihaknya datang untuk mengamankan pelaku. "Tak lama setelah kami dapat laporan dari korban, ada laporan lagi kalau pelaku tertangkap dan sempat dimassa. Kami langsung ke lokasi kejadian dan mengamankan pelaku itu," ungkapnya“Tersangka ini juga pernah tersandung kasus yang sama tentang pencurian dan pernah ditahan di Mapolsek Jambangan Surabaya dan Mapolsek Waru Sidoarjo,” tuturnya.[[8]](#footnote-8)Berdasarkan uraian diatas, maka penulis bermaksud untuk menyusun riset penelitian dalam bentuk penulisan hukum dengan judul tentang **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Tabung Gas Elpiji**

**( Studi Kasus Putusan No. 150/Pid.B/2012/Pn.Ung. )**

## Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas denganpenelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Pidana Positif saat ini?
2. Bagaimana Proses Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Tabung Gas Elpiji Di Pengadilan Negeri Ungaran (Studi Kasus Putusan No. 150/Pid.B/2012/PN.Ung.)
3. Kendala apa saja yang dihadapi dalam memutuskan perkara tersebut di Pengadilan Ungaran ?

## Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan masalah-masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk menyelesaikan dan mencari jawaban atas masalah tersebut dengan upaya :

1. Untuk mengetahui Hukum Tindak Pidana Positif pada saat saat ini.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian tabung Gas Elpiji di Pengadilan Negeri Ungaran.
3. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam memutuskan perkara pencurian tabung Gas Elpiji di Pengadilan Negeri Ungaran.

## Kegunaan Penelitian

Bagi peneliti, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan guna untuk penyusunan penulisan hukum atau skripsi sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dan peneliti berharap hasil dari penulisan hukum ini dapat menambah pengetahuan dan memberikan manfaat dari segi Teoritis dan Praktis.

* Manfaat Teoritis :

1. Diharapkan hasil dari penelitian dapat berguna dan memberikan keuntungan dalam perkembangan Ilmu Hukum khususnya dalam Hukum Pidana.
2. Dapat dijadikan pedoman dalam penelitian yag lain sesuai dengan bidang penelitian penulis.

* Manfaat Praktis :

1. Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada penegak hukum agar lebih bijaksana dalam menanggulangi suatu tindakan Pidana khususnya pencurian.
2. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai Hukum Pidana dan aturan-aturan yang sudah ditetapkam agar dapat menciptakan rasa aman dan tentram.

## Terminologi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | ISTILAH | PENJELASAN |
| 1 | PENEGAKAN | Proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[[9]](#footnote-9) |
| 2 | HUKUM | Peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan dan mencegah terjadinya kekacauan.[[10]](#footnote-10) |
| 3 | PELAKU | Merupakan subyek ( pelaku utama ) atau seseorang atau sekelompok yang melakukan perbuatan tersebut. |
| 4 | TINDAK PIDANA | Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman ( sanksi ) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. |
| 5 | PENCURIAN | Perbuatan dengan cara mengambil barang orang lain dengan maksud untuk memiliki tanpa izin dari pemiliknya dan menyebabkan seseorang tersebut menderita kerugian. |
| 6 | TABUNG GAS | Tabung bertekanan yang dibuat dari plat baja karbon canai panas, digunakan untuk menyimpan gas LPG (Liquified Petroleum Gas) dengan kapasitas pengisian antara 3 kg (7,3 liter) sampai dengan 50 kg (108 liter) dan memiliki tekanan rancang bangun minimum 18.6 kg.[[11]](#footnote-11) |
| 7 | PENGADILAN NEGERI | Sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di [ibu kota](https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota) [kabupaten](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten) atau [kota](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota). Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memriksa, memutus dan menyelesaikan perkara [pidana](https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana) dan [perdata](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perdata&action=edit&redlink=1) bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.[[12]](#footnote-12) |

## Metode Penelitian

Dalam menyusun sebuah karya ilmiah diperlukan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lingkungan atau lingkup tertentu untuk mendapatkan data-data yang aktual dan faktual sesuai dengan yang penulis inginkan dan untuk dapat mendapatkan data yang aktual dan faktual tersebut dibutuhkan sebuah metode yang disebut dengan metode penelitian.

Kerangka berpikir ahli hukum dalam metode penelitian Hukum menurut Soerjono Soekanto adalah “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pda metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gelaja hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Disamping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudiaan mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.[[13]](#footnote-13)

Maka tujuan dari sebuah penelitian sendiri adalah diharapkan dapat mengkaji dan menemukan kebenaran suatu obyek yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

1. Metode Pendekatan

### Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Yuridis Sosiologis sendiri memiliki arti yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud untuk menemukan tujuan dan fakta yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Maka yang diteliti pada awalnya yaitu berupa bahan pustaka yaitu bahan – bahan pustaka kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadsp data primer yang diperoleh dari lapangan dengan memperhatikan norma-norma hukum yang sudah berlaku dan dihubungna dengan fakta-fakta yang ditemui dari peneliti.

1. Spesifikasi Penelitian

### Spesifikasi Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah analisi deskriptif yaitu melakukan deskriptif terhadap hasil penelitian dengan data yang selepngkap dan sedetail mungkin. Deskriptif dimaksud adalah terhadap data primer maupun data sekunder yang berhubungan dengan Tinjauan Terhadap Proses Pemidanaan Tindak Pelaku Pencurian Tabung Gas Elpiji di Ungaran. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan Undang-Undang dan teori yang berkaitan.

1. Sumber Data

### Sumber data yang adalah tempat dimana dapat mendapatkan segala sesuatu informasi data yang diinginkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

## Data Primer

Data Primer adalah data yang didapatkan langsung dari obyeknya.[[14]](#footnote-14) Data Primer diperoleh dengan cara melakukan studi kasus langsung ke lapangan ( obyek penelitian ) yaitu wawancara langsung dengan narasumbernya. Wawancara sendiri adalah proses tanya jawab yang dilakukan secara lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih saling bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi – informasi atau keterangan yang sedang ditangani.

## Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mencatat bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer. Menurut Sugiyono, “data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya peneliti harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, selain itu peneliti peneliti menggunakan data yang diperoleh dari internet.”[[15]](#footnote-15)

Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### Bahan Hukum Primer menurtut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad yaitu “bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.”[[16]](#footnote-16)

### Dalam hal ini penulis menggunakan bahan primer yang berupa :

### 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP )

### 2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP )

### 3. Al-Quran dan Hadits – Hadits

### Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

### Bahan hukum sekunder dapat berupa :

### Buku – Buku Hukum ( Karya Tulis Hukum atau Pandangan Para Ahli Hukum )

### Jurnal Hukum

### Internet

### Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikanpetunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan kamus umum, jurnal hukum, internet, surat kabar dan makalah yang ada dalam media masa.

### Metode Penyajian Data

### Pada laporan penelitian, bagian hasil penelitian terdapat bahasa mengenai deskripsi data, analisis data dan pembahasan. Deskripsi data adalah kegiatan menyediakan data dari data yang dikumpulkan.

### Hal ini dilakukan dengan cara megumpulkan data-data yang merupakan data yang berserakan, sulit dimengerti dan tidak teratur agar dapat tersusun dengan rapi, dapat dibaca dan dapat dimengerti dengan mudah maka dilakukan penyajian data atau yang biasa disebut penyusunan data. Dengan demikian penyajian data dalam kegiatan menyusun data mentah berupa data penelitian yang diperoleh dan yang berserakan menjadi lebih teratur dan dapat dianalisis disajikan dalam bentuk skripsi.

### Metode Analisa Data

### Secara umum analisis data adalah kegiatan yang dilakukan untuk melihat kembali data yang ditulis. Analisi data dapat berupa menentang, memberi kritik, menambah atau memberi masukan dan atau mendukung kemudian memberikan kesimpulan dari penelitian dengan fikiran sendiri dan bantuan teori.

### Dalam hal ini penulis bertujuan untuk memberikan gambaran, pemaparan atau sukjek dan obyek penelitian sebagaimana hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

### f. Lokasi Penelitian

### Lokasi untuk melakukan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah di Pengadilan Negeri Ungaran, Jl. Gatot Subroto No.16 Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah

## Sistematika Penulisan Hukum

### Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi, penulis akan memberikan gambaran dan menguraikan penulisan hukum sesuai dengan aturan yang ada yaitu dengan sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan skripsi yaitu adalah membagi empat bab yang setiap bab dibagi atas sub-sub bagian yang maksudnya untuk mempermudah memahami dari hasil enelitian. Adapun empat bab tersebut yang dimaksud adalah sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

### Dalam bab Pendahuluan ini diuraikan beberapa macam sub bab, yaitu tentang : Latar Belakang Masalah, Peumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Teriminologi, Metode Penelitian ( metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber data, metode penyajian data, metode analisa data, dan lokasi penelitian ) dan Sistematika Penulisan

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

### Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan – landasan teori yang disertai dengan pembahasan tentang masalah yang menjadi penelitian. Dalam bab ini berisi beberapa sub bab, yaitu :

### Tindak Pidana

### Pengertian Tindak Pidana

### Jenis – Jenis Tindak Pidana

### Unsur – Unsur Tindak Pidana

### Pencurian

### Pengertian Pencurian

### Jenis dan Unsur Pencuriain

### Pemidanaan

### Teori Pemidanaan

### Jenis dan Sanksi Pidana

### Pengertian Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Islam

### Sumber hukum

### Dalil Al- Quran

### Pengertian Elpiji

### BAB III : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

### Bab ini berisi tentang hasil dari penelitian yang disertai dengan pembahasan yang sudah dioleh dengan penyajian data yang dapat dipahami tentang penyelidikan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Pencurian Tabung Elpiji (Studi Kasus di Pengadilan Ungaran, Kabupaten Semarang)

1. Bagaimana proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian tabung Gas Elpiji di Pengadilan Negeri Ungaran
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam memutuskan perkara tersebut di Pengadilan Ungaran

### BAB IV : PENUTUP

### Pada Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan Hukum yang didalamnya berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan atas isi dari skripsi yang dibahas dan saran dari Penulis untuk penulis lain.

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

1. **Tindak Pidana**
2. **Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan kejahatan atau perbuatan jahat. Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum belanda yaitu *strafbaarfeit.*[[17]](#footnote-17) Didalam KUHPidana (WvS) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*. Kepustakaan tentang hukum pidana yang menggunakan delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan Undang-Undang mempergunakan suatu peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.[[18]](#footnote-18)

Adami Chazawi menerangkan bahwa Indonesia sendiri dikenal ada tujuh istilh yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah strafbaarfeit. Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dari berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* antara lain adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan yang terakhir adalah perbuatan pidana[[19]](#footnote-19) Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar dan feit, dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari strafbaar feit itu, ternyata straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan dapat dan boleh. Sementara itu,untuk kata feit diterjemahkan dengan tinda, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Secara leterlijik, “strafbaar feit” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.”

Pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa – peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari – hari dalam kehidupan masyarakat.[[20]](#footnote-20)

Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana” dengan menerjemahkan istilah feit secara hanifat menjadi “peristiwa”. Namun Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena “peristiwa” adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja.[[21]](#footnote-21) Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut.

Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana itu dapat disamakan dengan criminal act, jadi berbeda dengan strafbaar feit, yang meliputi pula pertanggungjawaban pidana. Katanya criminal act berarti kelakuan atau akibat yang juga disebut dengan actus reus.[[22]](#footnote-22)

Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik yang berasal dari bahasa Latin yaitu delictum dan dalam bahasa Belanda disebut delict. Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia artinya delik diberi batasan sampai sebagai berikut :

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakann pelanggaran terhadap Undang-Undang Tindak Pidana.”

Mengenai “delik” dalam arti strafbaar feit, para pakar hukum pidana masing-masing memberi definisi sebagai berikut :

1. Vos : Delik adalah feit yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan Undang-Undang.
2. Van Hamel : Delik adalah suaty serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.
3. Prof. Simons : Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang tindakan tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.[[23]](#footnote-23)

Pada dasarnya pendapat para sarjana atau para ahli dibagi dalam dua golongan yaitu “*aliran monistic*” dan *“aliran dualistic*”. Aliran Monistic adalah aliran yang melihat kecenderungan syarat untuk adan ya pidana itu, semuanya merupakan sifat dari perbuatan atau dengan kata lain tidak memisahkan antara perbutana pidana ( *Criminal Act* ) dengan pertanggungjawaban pidana (*Criminal Responsibility*) sedangkan aliran dualistic adalah aliran yang memisahkan antara perbuatan pidana (*Criminal Act*) dengan pertanggungjawaban pidana (*Criminal Responbility*).

Berikut golongan aliran monistic antara lain :

1. Van Hummel menyatakan bahwa strafbaar feit adalah : een wettelijk omschrevenmen schelijk gedraging onrecghtmatig, stiafivardin en aan schuld te wijten.

Unsur – unsur :

1. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang
2. Melawan hukum
3. Dilakukan dengan kesalahan, dan
4. Patut dipidana.
5. E. Mazger : die straftat ist der inbegrief der voraussetzungen der straf ( tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana)

Unsur - unsur :

1. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia ( aktif atau membiarkan )
2. Sifat melawan hukum ( bersifat objektif maupun subjektif )
3. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
4. Diancam dengan pidana.
5. Wirjono Prodjodikoro, beliau mengemukakan definisi pendek yaitu tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.

Unsur objektif tindak pidana meliputi :

1. Perbuatan orang
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan tersebut
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut seperti ketentuan Pasal 281 KUHP yang mengandung syarat “openbaar”(dimuka umum).

Unsur subjektif tindak pidana meliputi :

* Orang yang mampu bertanggungjawab
* Adanya kesalahan ( *dolus atau culpa* ), perbuatan tersebut harus mengandung kesalahan. Kesalahan yang dimaksud dapat berhubungan dengan perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan tersebut dilakukan.[[24]](#footnote-24)

Dari definisi-definisi diatas, jelas sekali tidak ada pemisahan antara *Criminal Act (perbuatan pidana) dengan Criminal Responsibilility ( pertanggunjawaban pidana ).*

Selanjutnya golongan dualistic :

1. H.B. Vos : Een srtafbaar feit is een menselijke gedraging waarop door de wet ( genomen in de, ruime zin van “wettelijke bepaling” ) straf is gesteld, een gedraging des, die in het algemeen ( tenzi er een uitslutingsground bestaat ) op straffe verboden is.

Jadi, menurut Vos Strafbaar fiet hanya berumuskan :

1. Kelakuan manusia
2. Diancam pidana dalam Undang-Undang
3. Moelyanto, beliau memakai istilah perbuatan yang dirumuskan sebagai berikut yaitu, “perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”

Untuk adanya perbuataan pidana harus ada unsur-unsur :

1. Perbuatan (manusia)
2. Memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (syarat formil)
3. Bersifat melawan hukum (syarat matriil)[[25]](#footnote-25)

Unsur-unsur tindak pidana tersebut mengisyaratkan bahwa seorang yang mampu bertanggungjawab secara hukum dan sifatnya bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang, perlu syarat formil sebagai unsur tindak pidana dalam penerapan hukum tindak pidana dilakukan asas legalitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 KUHP. Sedangkan syarat materiil harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut untuk dilakukan, oleh karna bertentangan dengan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan masyarakat itu.

Berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana yang dibedakan diatas menisyaratkan bahwa syarat-syarat perbuatan yang dapat dipidana dan tidak cukup hanya pemenuhan unsur-unsur tindak pidananya melainkan harus disertai dengan syarat-syarat pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana yang dimaksud berarti bahwa pemidanaan terhadap seorang tidak hanya didasarkan pada perbuatan pidananya, akan tetapi perbuatan orang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab.

Syarat yuridis formil, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar Undang-Undang pidana, jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu harus yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.[[26]](#footnote-26) Tindak pidana adalah perilaku manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan keasalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia melakukan kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

Menurut Van Hmamel mengatakan bahwa “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum” menurut Van Hmamel tindak pidana meliputi lima unsur, yaitu :

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
4. Seseorang dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya
5. Sifat perbuatannya yang mempunyai sifat dapat dihukum.[[27]](#footnote-27)

Pengertian tindak pidana dirangkum dalam **Pasal 11 RUU KUHP 2013**, sebagai berikut :

**Pasal 11**

“(1)Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

(2)Untuk dinyatakans ebagai tindakan pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

(3)Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada

alasan pembenar.”[[28]](#footnote-28)

Dalam fungsinya selain sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum juga memiliki tujuan. Hukum memiliki sasaran yang harus dicapai, adapun pokok dari tujuan hukum adalah menciptakan tataan masyarakat yang tertib, menciptakan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dimasyarakat diharapkan kepentingan manusia dapat terlindungi. Hukum bertugas membagi antara hak dan kewajiban antar perorangan didalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara dalam memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.[[29]](#footnote-29)

Dasar Pembedaan dalam cara Merumuskan Tindak Pidana

1. Dari sudut cara Pencantuman Unsur-Unsur dan Kualifikasi Tindak Pidana, ialah :
2. Mencantumkan Unsur Pokok, Kualifikasi dan Ancaman Pidana

Cara pertama ini adalah merupakan cara yang paling sempurna. Cara ini digunakan terutama dalam hal merumuskan tindak pidana dalam bentuk pokok/standart dengan mencantumkan unsur-unsur objektif maupun unsur subjektif, misal : Pasal 138 (pembunuhan), 362 (pencurian), 208 (pemerasan), 372 (pengelapan), 378 (penipuan), 406 (pengerusakan).

Dalam tindak pidana yang tidak masuk dalam kelompok bentuk standart diatas juga ada tindak pidana lainnya yang dirumuskan secara sempurna demikian dengan kualifikasi tertentu, misalnya 108 (pemberontakan).

Dimaksud unsur pokok atau unsur esensial adalah unsur yang membentuk pengertian yuridis dari tindak pidana tertentu. Unsur-unsur ini dapat dirinci secara jelas dan untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan menjatuhkan pidana maka semua unsur itu harus dibuktikan dalam persidangan.

1. Mencantumkan semua Unsur Pokok tanpa Kualitatif dan Mencantumkan Ancaman Pidana

Cara inilah yang paling banyak digunakan dalam merumuskan tindak pidana dalam KUHP. Tindak Pidana yang menyebutkan unsur-unsur pokok tanpa menyebut kualitatif dalam praktek kadang-kadang terhadap suatu rumusan diberi kualifikasi tertentu, misalnya terhadap tindak pidana pada pasal 242 diberi kualifikasi sumpah palsu, stellionat (305), penghasutan (160), laporan palsu (220), membuang anak (305), pembunuhan anak (341), penggelapan pegawai negeri (415)

1. Mencantunkan Kualifikasi dan Ancaman Pidana

Tindak Pidana yang dirumuskan dengan cara ini adalah yang paling sedikit hanya dijumpai pada pasal tertentu saja. Model perumusan ini dapat dianggap sebagai perkecualian. Tindak Pidana yang dirumuskan dengan cara yang sangat singkat ini dilatar belakangi oleh semua ratio tertentu, misalnya pada kejahatan penganiayaan (351), Pasal 351 ayat (1) dirumuskan dengan sangat singkat, yakni penganiayaan (mishandeling*)* diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

1. Dari sudut titik beratnya Larangan

Dari sudut titik beratnya larangan maka dapat diberikan pula antara merumuskan dengan cara formil (pada tindak pidana formil) dan dengan cara materiil (pada tindak pidana materiil).

1. Dengan cara Formil

Perbuatan pidana yang dirumuskan secara formil disebut dengan tindak pidana formil *( formeel delict )*. Disebut dengan cara formil karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu. Jadi yang mejadi pokok larangan dalam rumusan itu adalah melakukan perbuatan yang melawan hukum tertentu, apabila dengan selesainya tindak pidana maka jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, maka tindak pidana itu selesai pula tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan yang melawan hukum tersebut.[[30]](#footnote-30) Misalnya Pasal 362 KUHP merumuskan kelakuan yang dilarang yaitu mengambil barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain. Namun kelakuan mengambil saja tidak cukup untuk memidana seseorang, diperlukan pada keadaan yang menyertai pengambilan itu “adanya maksud pengambilan untuk memilikinya dengan melawan hukum”

Unsur tindak pidana ini dinamakan unsur melawan hukum yang subjektif, yaitu kesengajaan pengambilan barang itu diarahkan ke perbuatan melawan hukum sehingga menjadi unsur objektif bagi para sarjana hukum yang berpendapat monitis terhadap tindak pidana atau merupakan unsur *actus reus, criminal act,* perbuatan kriminal bagi yang berpendapat duakisasi tehadap tindak pidana.[[31]](#footnote-31)

1. Dengan cara Materiil

Tindak pidana yang dirumusakn dengan cara metriil disebut dengan tindakan pidana materiil *(materieel delict)*. Perumusan perbuatan pidana dengan cara materiil maksudnya adalah perbuatan pidana yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pidana tersebut, sedangkan wujud dari perbuatan pidananya tidak menjadi persoalan dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, misalnya Pasal 338 (pembunuhan) yang menjadi larangan ialah menimbulkan akibathilangnya nyawa orang lain, sedangkan wujud dari perbuatan dari menghilangkan nyawa (pembunuhan) itu tidaklah menjadi persoalan apakah dengan menembak, mencuri dan sebagainya.

Dalam hubungannya dengan selesainya perbuatan pidana maka selesainya perbuatan pidana bukan bergantung pada selesainya wujud perbuatan, akan tetapi bergantung pada apakah dari wujud perbuatan pidana itu akibatnya telah timbul atau belum, jika wujud perbuatan telah selesai namun akibatnya belum timbul maka perbuatan pidana itu belum selesai, yang terjadi adalah percobaannya.[[32]](#footnote-32)

1. Dari Sudut Pembedaan Tindak Pidana antara bentuk Pokok, bentuk yang Lebih Berat dan yang Lebih Ringan
2. Perumusan dalam bentuk Pokok

Jika dilihat dari sudut sistem pengelompokan atau pembedaan perbuatan pidana antara bentuk standart (bentuk pokok) dengan bentuk yang diperberat dan bentuk yang lebih ringan juga vara merumuskannya dapat dibedakan antara merumuskan perbuatan pidana dalam bentuk pokok dan dalam bentuk yang diperberat dan atau yang lebih ringan.

Dalam hal bentuk pokok pembentukan undang-undang selalu merumuskan secara sempurna, yaitu dengan mencantumkan semua unsur-unsur secara lengkap. Dengan demikian rumusan bentuk pokok ini adalah merupakan pengertian yuridis dari tindak pidana itu. Misal, Pasal 338, 362, 278, 269, 406.

1. Perumusan dalam bentuk yang Diperingan dan Diperberat

Rumusan dalam bentuk yang lebig ringan atau lebih ringan dari perbuatan pidana yang bersangkutan, unsur-unsur bentuk pokoknya tidak diulangi kembali atau dirumuskan kembali melainkan menyebut saja Pasal bentuk pokok ( misalnya : 364, 373, 379 ) atau kualifikasi bentuk pokok ( misalnya : 339, 363, 365 ) kemudian menyebutkan unsur-unsur yang menyebabkan diperingan atau diperberatnya pidana itu.

Cara yang demikian dapat diterima mengingat merumuskan perbuatan pidana prinsip penghematan kata-kata ( ekonomis ) namun tegas dan jelas tetap harus dipegang teguh. [[33]](#footnote-33)

**2. Jenis – Jenis Tindak Pidana**

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu :

1. Menurut KUHP

Menurut KUHP yang berlaku diIndonesia sebelum tahun 1981 dikenal kategorisasi tiga jenis peristiwa pidana, yaitu :

1. Kejahatan *(crims)*
2. Perbuatan buruk *(delict)*
3. Pelangaran *(contravenrions)*

Menurut KUHP yang berlaku sekarang peristiwa pidan itu ada dalam dua jenis saja yaitu “*misdriif*” (kejahatan) dan “*overtranding*” (pelanggaran). KUHP tidak memberikan ketentuan syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHP hanya menentukan semua yang terdapat dalam buku II adalah kejahatn, sedangkan semua yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran.[[34]](#footnote-34)

1. Menurut cara merumuskannya

Tindak pidana dibedakan antara tindak pidana formil ( formeel delicten ) dan tindak pidana materiil ( materiel delicten ).

Tindak pidana formil itu adalah tindak pidana yang perumusannya diibaratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik.

Misal : penghasutan (pasal 160 KUHP ), dimuka umum menyatakan perasaan kebencian, perumusan atau penghinaan kepada salah sau atau lebih golongan rakyat di Indonesia (Pasal 156 KUHP); penyuapan (Pasal 209,210 KUHP); sumpah palsu (Pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP); pencuian (Pasal 362).

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya diibaratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang), tindak pidana ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan.

Misal : pembakaran (Pasal 187 KUHP); penipuan (Pasal 378 KUHP); pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Batas antara delik formil dan delik materiil tidak tajam misal Pasal 362.

1. Berdasarkan bentuk kesalahannya

Dibedakan antara tindak pidana sengaja *( doleus delicten )* dan tindak pidana tidak sengaja *( culpose delicten )*

Tindak pidana sengaja *( doleus delicten )* adalah tindka pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau ada unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana tidak sengaja *( culpose delicten )* adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur kealpaan yang unsur kesalahannya berupa kelalaian, kurang hati-hati, dan tidak karena kesengajaan.

Contohnya :

1. Delik Kesengajaan : 362 (maksud), 338 (sengaja), 480 (yang diketahui) dll
2. Delik *Culpa* : 334 (karena kealpaanya), 359 (karena kesalahannya).
3. Gabungan (ganda) : 418, 480 dll[[35]](#footnote-35)
4. Berdasarkan macam perbuatannya

Dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/pasif dapat juga disebut tindak pidana komisi ( delicta commissionis ) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi ( delicta comissionis ).

Tindak pidana aktif ( delicta commissionis ) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut perbuatan materiil) adalah perbuatan yang mewujudkan diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Perbuataan aktif ini terdapat baik dalam tindakan pidana yang dirumuskan secara formil maupun materiil. Sebagian besar tindakan pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindakan pidana aktif.

Berbeda dengan tindak pidana pasif, dalam tindakan pidana pasif ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila tidak dilakukan (aktif) perbuatan itu, hukumnya ia telah melanggar kewajiban. Disini ia telah melakukan tindakan pidana pasif. Tindak pidana ini dapat disebut juga dengan tindakan pidana pengabaian suatu kewajiban hukum. Misalnya dalam pembunuhan 338 (sebenarnya tindak pidana aktif) tetapi jika akibat matinya itu disebabkan karena seseorang tidak berbuat sesuai kewajiban hukumnya harus ia perbuat dan karena menimbulkan kematian, seperti seorang ibu tidak menyusui anaknya agar mati, perbuatan ini melanggar pasal 338 dengan secara perbuatan pasif.

Contohnya :

1. Delik Aktif : 338, 351, 353, 362, dll
2. Delik Pasif : 224, 304, 338 ( pada ibu menyusui ), 522
3. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya

Maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjai seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama / berlangsung terus.

Tindak pidana yang terjadi dalam waktu yang seketika disebut dengan *aflopende delicten*. Misalnya pencurian (362), jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna.

Sebaliknya, tindakan pidana yang terjadi berlangsung lama disebut dengan *voortderende delicten.* Seperti Pasal (333), perampasan kemerdekaan itu berlangsung lma, bahkan sangat lama dan akan terhenti setelah korban dibebaskan/terbebaskan.

Contoh :

1. Delik terjadi seketika : 362, 338,dll
2. Delik berlangsung terus : 329, 330, 331, 333, dll
3. Berdasarkan Sumbernya

Berdasarkan sumbernya dapat dibedakan antara tindak pidana khusus dan tindak pidana umum. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu.

Contoh tindak pidana khusus adalah dalam Titel XXVIII Buku II KUHP : kejahatan dalam jabatan yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negri.

Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang.

Contoh :

1. Delik Umum : KUHP
2. Delik Khusus : UU No. 31 th 1999 tentang tindak pidana korupsi, UU No. 5 th 1997 tentang psikotropika, dll.
3. Dilihat dari sudut subjek hukumnya

Dapat dibedakan antara tindak pidana communia ( delicta communia ) yang dapat dilakukan siapa saja dan tindak ( pidana propia ) dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.

Jika dilihat dari sudut subjek hukumnya, tindak pidana itu dapat dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang ( delicta communia) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu ( delicta propia). Pada umumnya dibentuk untuk berlaku kepada semua orang, akan tetapi ada perbuatan-perbuatan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berkualitas tertentu saja.

Contoh :

1. Delik Communia : pembunuhan (318), penganiayaan (351), dll
2. Delik Propoa : pegawai negri ( pada kerjaan jabatan ), nahkoda ( pada kerjaan pelayaran ), dll
3. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penentuan

Maka dibedakan antara tindak pidana biasa ( gewone delicten ) dan tindak pidana aduan ( klacht delicten ).

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukam penuntutan pidana tidak disyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Sedangkan delik aduan adalah tinsak pidana yang untuk dilakukan penutupan pidana disyaratkan adanya aduan dari yang berhak.

Contoh :

1. Delik biasa : pembunuhan (338), dll
2. Delik aduan : pencemaran (310), fitnah (311), dll
3. Berdasarkan berat dan ringannya pidana yang diancamkan.

Maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (eevoudige delicten) tindak pidana yang diperberat (gequalificeerde delicten) dan tindak pidana yang diperingan (gepriviligieerde delicten).

Tindak pidana yang ada pemberatannya, misalnya : Tindak Pidana yang menyebabkan luka berat atau matinyaorang ( Pasal 351, ayat (2), (3) KUHP ), pencurian pada waktu malam hari dsb. ( Pasal 363 ). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya : pembunuhan anak-anak ( Pasal 341 KUHP ), delik ini disebut “geprivelegeerd delict”. Delik sederhana, misal : penganiayaan ( Pasal 351 KUHP ), pencurian ( Pasal 362 KUHP ).

1. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi

Maka tindak pidana terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukumnya yang dilindungi seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

1. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan

Dibedakan antara tindak pidana tunggal ( enklevoudige delicten ) dan tindak pidana berangkai ( samengestelde delicten ).

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang terdiri atas suatu perbuatan yang hanya dilakukan seklai saja. Contoh : Pasal 480 KUHP ( penadahan ). Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana bersusun adalah delik yang terdiri atas beberapa perbuatan. Contoh : Pasal 481 KUHP, kebiasaan menyimpan barang-barang curian, contoh ini juga disebut *gewoontw delicten* ( delik kebiasaan ) yang mungkin atau biasa dilakukan oleh tukang rombongan/loak.[[36]](#footnote-36)

**3. Unsur - Unsur Tindak Pidana**

Pada umumnya para ahli menyatakan unsur-unsur dari peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau delik yang terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif.

Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau delict adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur tersebut terdiri dari :

1. Unsur Objektif

yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akinat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.

1. Unsur Subjektif,

yaitu perbuatan seorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh Undang-Undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).[[37]](#footnote-37)

Menurut Lamintang, unsur delik terdiri dari 2 macam unsur yang disebut dengan unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada si pelaku yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkadang ada didalam hatinya.. Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan atau tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Dari unsur diatas hanya ada 2 unsur yang masuk dalam unsur subjektif yaitu unsur kesalahan dan unsur melawan hukum, selebihnya masuk kedalam unsur objektif.

Unsur subjektifdari suatu tindakan pidana, adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
2. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dll
3. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad misalnya terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
4. Maksud atau voornemen pada suau percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP
5. Perasaan takut atau nervess seperti yang lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

Unsur objektif dari suatu tindak pidana, adalah :

1. Sifat melangar hukum atau *wedwerrechtelijkheid*
2. Kualitas si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP
3. Kualitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan pidana sebagau penyebaba dengan suatu kenyataan sebagai akibat.[[38]](#footnote-38)

Menurut Satocid Kartanegara, unsur delik terdiri dari unsur objektif dan usnur subjektif . unsur objektif adalah unsur yang terapat diluar diri manusia, yaitu berupa :

1. Suatu tindakan,
2. Suatu akibat,dan
3. Keadaan (*omstandigheid*)[[39]](#footnote-39)

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

1. Perbutan:
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum):
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan):

Menurut Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana yaitu :

1. Kelakuan manusia
2. Diancam dengan pidana
3. Dalam peraturan Undang-Undang[[40]](#footnote-40)

Dalam Buku II KUHP terdapat macam-macam tetang rumusan tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam buku III KUHP memuat tentang pelanggaran. Dalam setiap rumusan yang ada tedapat unsur didalamnya, yaitu tentang perbuatan atau tingkah laku walaupun terdapat pengecualian seperti pada Pasal 351 tengang (penganiayaaan). Disamping itu masih banyak lagi unsur-unsur lain yang mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khsusus.

Dari rumusan – rumusan tindak pidana dalam **KUHP** terdapat adanya *11 unsur* tindak pidana, yaitu :

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
9. Unsur objek hukum tentang pidana
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana[[41]](#footnote-41)

Dari 11 unsur diatas, unsur melawan hukum dan unsur kesalahan (2 & 3) termasuk dalam unsur subjektif, dan lainnya (1, 4 – 11) termasuk dalam unsur objektif. Unsur melawan hukum adakalanya bersifat menjadi unsur objektif misalnya melawan hukumnya perbuatan mengambil pada pencurian (Pasal 362 KUHPidana) terletak bahawa pada mengambil itu diluar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif).

Dilihat dari unsur-unsur diatas, maka perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan agar dapat dikatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai peristiwa pidana adalah :

1. Harus ada suatu perbuatan. Maksudnya, memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, kegiatan ini terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahamu orang lain sebagai seseuatu yang merupakan peristiwa.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilakukan dalam ketentuan hukum. Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti apa yang terjadi. Pelaku wajib mempertanggugjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu.
3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dapat dibuktikakn sebagai perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
4. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.
5. Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya, jika ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya.

**B. PENCURIAN**

**1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian**

Pengertian umum mengenai pncurian adalah mengambil barang orang lain. Dari segi bahasa (etimologi, pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe”, dan akhiran “an”. Arti kata “cur”i adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu. Sedangkan arti kata “pencurian” adalah proses, cara dan perbuatannya.

Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang. Dalam Buku II KUHP telah dirumuskan secara sempurna, artinya dalam rumusannya menurut unsur-unsur secara lengkap baik unsur-unsur objektif maupun unsur-unsur sebjektif. Unsur objektif dapat berupa : unsur perbuatan materiil, unsur benda atau barang, unsur keadaan yang menyertai obyek benda, unsur upaya untuk melakukan perbuatan yang dilarang, unsur akibat konstitutif. Unsur subjektif dapat berupa : unsur kesalahan dan unsur melawan hukum.

Menurut Pasal 362 KUHPidana pencurian adalah :

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah”.[[42]](#footnote-42)

Melihat rumusan pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara “formal” dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”. Dalam artian kata “mngambil” (wagnamen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkan ke tempat lain.

**2. Jenis dan Unsur Tindak Pidana Pencurian**

Penyusunan Undang-Undang mengelompokkan tindak pidana pencurian kedalam klasifikasi kejahatan terhadap harta kekayaan yang terdapat pada buku ke-2 KUHP yang diatur mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Delik pencurian terbagi kedalam beberapa jenis, yaitu :

1. Pencurian Biasa ( Pasal 362 KUHPidana )
2. Pencurian dengan Pemberatan atau Pencurian dengan Berkualifikasi ( Pasal 363 KUHPidana )
3. Pencurian Ringan ( Pasal 364 KUHPidana )
4. Pencurian dengan Kekerasan ( Pasal 365 KUHPidana )
5. Pencurian dengan Penjatuhan Pencabutan Hak (Pasal 366 KUHPidana)
6. Pencurian dalam Keluarga ( Pasal 367 KUHPidana )

Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan dan menjelaskan rumusan Pasal- Pasal diatas sebagai berikut :

1. **Tindak Pidana Pencurian Biasa ( Pasal 362 KUHPidana )**

Istilah “pencurian biasa” digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian “pencurian dalam arti pokok”.

Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

“ Barang siapa mengambil barang seseuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan Ratus Rupiah”.

Mengenai unsur – usnur pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut :

**Unsur Objektif :**

1. Mengambil
2. Suatu barang/benda
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain

**Unsur Subjektif :**

1. Dengan maksud
2. Memiliki untuk dirinya sendiri
3. Secara melawan Hukum[[43]](#footnote-43)

Unsur Objektif :

1. Mengambil

Perbuatan “mengambil” bermakna sebagai “setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain. Perlu diketahui arti kata dari mengambil itu sendiri baik Undang-Undang maupun pembentuk Undang-Undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, masing-maisng yakni :

1. Mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada;
2. Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain;

Sehingga dapat dimenegrti jika dalam doktrin kemudian telah timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut yaitu antara lain :

BLOK : mengambil itu adalah suatu perilaku yang membuat suatu barang dalam penguasaan yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksud tentang apa yang ia inginkan dengan barang tersebut.

SIMONS : Mengambil adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaan atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dalam penguasaan yang nyata, dengan kata lain apabila waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaanya.

VAN BEMMELEN dan VAN HATTUM: Mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaan tanpa bantuan atau hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.[[44]](#footnote-44)

1. Suatu barang/benda

Dalam perkembangannya pengertian “barang” atau “benda” tidak hanya terbatas pada benda atau barang berwujud atau bergerak, tetapi termasuk dalam pengertian barang/benda tidak berwujud dan tidak bergerak.

Benda yang dikategorikan barang/benda berwujud dan tidak berwujud misalnya, halaman dengan segala sesuatu yang dibangun diatasnya, pohon-pohon dan tanaman yang tertanam dengan akarnya dipetik didalam tanah, buah-buahan yang belum dipetik dan lain sebagainya. Dengan terjadinya perluasan makna tentang barang/benda tersebut kemudian dapat pula menjadi objek pencurian.

Konsepsi mengenai barang menunjuk pada pengertian bahwa orang tesebut haruslah memiliki nilai, tetapi nilai barang tersebut harus secara ekonomis.

Barang yang dapat menjadi objek pencurian adalah barang yang memiliki pemilik. Apabila barang tersebut tidak dimiliki oleh siapapun, demikian juga apabila barang tersebut oleh pemiliknya telah dibuang, tidak lagi menjadi suatu objek pencurian.

1. Yang sebaian atau seluruhnya Milik orang lain

Benda atau barang yang diambil itu haruslah merupakan barang/benda yang dimiliki baik sebagian atau seluruhnya oleh orang lain. Jadi, yang terpenting dari unsur ini adalah keberadaan pemiliknya, karena benda/barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat penjadi objek pencurian.

Dengan demikian dalam kejahatan pencurian tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri tersebut milik orang lain secara keseluruhan, pencurian tetap ada sekalipun benda/barang tersebut kepemilikannya oleh orang lain hanya sebagian saja. Dengan kata lain unsur kepemilikan yang melekat pada barang/benda tersebut tidak bersifat penuh.

Unsur Objektif :

1. Dengan maksud

Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan demikian, unsur “dengan maksud” menunjuk adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini kesengajaan atau dengan maksud tersebut ditunjukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum atau tidak sah”.

Walaupun pembentuk Undang-Undang tidak menyatakan tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud Pasal 362 KUHPidana harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak disangka lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena Undang-Undang Pidana yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja.

1. Memiliki untuk dirinya sendiri

Istilah “memiliki untuk dirinya sendiri” seringkali diterjemahkan dengan istilah menguasai, namun seorang yang mengambil barang/benda pada dasarnya belum sepenuhnya menjadi pemilik dari barang yang diambilnya, tetapi baru menguasai barang tersebut.

Bentuk-bentuk dari tindakan “memiliki untuk dirinya sendiri” atau “menguasai” tersebut dapat berbentuk beberapa hal misalnya menghibahkan, menjual, menyerahkan, menjaminkan, memakai sendiri, mengadaikan, dan juga suatu tindakan yang bersifat pasif yaitu tidak melakukan hal apapun terhadap barang tersebut, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang tersebut tanpa memperoleh persetujuan dari pemiliknya.

1. Secara melawan hukum

Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu :

“maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum”.

Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan kedalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditunjukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.

Pendapat-pendapat diatas diambil dari teori-teori dibawah ini :

* Teori Kontrektasi ( contrectatie theorie ), teori ini mengatakan bahwa untuk adanya suatu perbuatan “mengambil” disyaratkan dengan sentuhan fisik, yakni pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempat semula.
* Teori Ablasi ( ablatie theorie ), menurut teori ini untuk selesainya perbuatan “mengambil” itu disyaratkan benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku.
* Teori Aprehensi ( apprehensie theorie ), berdasarkan teori ini adanya perbuatan “mengambil” itu disyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaan yang nyata.[[45]](#footnote-45)

**2. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan ( Pasal 363 KUHPidana )**

Pencurian dengan pemberatan biasanya dilakukan pada keadaan tertentu atau dengan cara-cara tertentu sehinga biasanya ancaman pidananyalebih berat dari pencurian biasanya. Pencurian dengan pemberatan biasanya disebut dengan pencurian yang dikualifikasikan. Adapun bunyi Pasal yang mengatur tentang pencurian dengan unsur pemberatan, adalah :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;

Ke-1 pencurian ternak

Ke-2 pencurian pada waku kebakaran, letusan, banji, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang

Ke-3 pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Ke-4 pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Ke-5 pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

1. Jika pencurian yang diterangkan dalam Ke-3 disertai dengansalah satu tersebut Ke-4 dan Ke-5 maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

**3. Tindak Pidana Pencurian Ringan ( Pasal 364 KUHPidana )**

Pencurian “ringan” adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian yang didalam bentuknya yang pokok, yang karna ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan) ancaman pidananya menjadi diperingan. Jenis pencurian ini diaturan dalam Pasal 364 KUHPidana yang menentukan :

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal (6) ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima ribu rupiah, dikenai karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atua denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Dari rumusan yang terdapat pada Pasal 364 KUHPidana dapat diketahui bahwa dalam Undang-Undang disebut pencurian ringan dapat berupa :

1. Tindak pidana pencurian pokok
2. Tindak pidana yang dilakukan dua orang atau lebih
3. Tindak pidana pencurian yang untuk mengusahakan jalan masuk ketempat kejahatan untutk mencapai benda yang diambilnya, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, perusakan, pemanjatan, atau telah memakai kunci palsu atau menggunakan perintah palsu.

Dengan syarat :

1. Tidak dilakukan didalam sebuah tempat kediaman
2. Tidak dilakukan diatas sebuah pekarangan tertentu yang di antaranya terdapat sebuat tempat kediaman, dan
3. Nilai benda yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.[[46]](#footnote-46)

Tentang nilai benda yang dicuri semula ditetapkan tidak lebih dari dua puluh lima Rupiah, tetapi kemudian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 16 Tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diubah menjadi dua ratus lima puluh Rupiah.

1. **Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan ( Pasal 365 KUHPidana )**
2. Diancam pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang-orang dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
3. Diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun

Ke-1 Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekaragan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Ke-2 jika perbuatannya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Ke-3 jika masuknya ketempat kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Ke-4 jika perbuatannya mengakibatkan luka berat

1. Jika perbuatannya mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun penjara
2. Diancam dengan pidana mati atu pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatannya mengakibatkan lika berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No 1 dan 3.
3. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau dikenal dengan perampokan, sebenarnya istilah antara pencurian dengan kekerasan dan perampokan dari segi redaksionsl kedua istilah tersebut berbedanamun memiliki makna yang sama misalnya jika disebutkan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sama halnya dengan merampok. Oleh karena itu walaupun tidak dikenal dalam KUHPidana namun perumusannya sebagai perbuatan pidana jelas telah diatur sehingga patut dihukum seperti halnya pencurian dengan kekerasan.[[47]](#footnote-47)

Adapun unsur-unsur yang tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Pasal 365 KUHPidana ini sama dengan unsur-unsur Pasal 362 KUHPidana dengan tambahan unsur-unsur sebagai berikut :

* Pasal 365 ayat (1) :

1. Pencurian yang didahului
2. Disertai atau diikuti
3. Kekerasan atau ancaman kekerasan
4. Terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri

* Pasal 365 ayat (2) :

1. Waktu malam
2. Dalam sebuah pekarangan rumah atau pekarangan tertutup
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
4. Membongkar, merusak, memanjat, atau menggunakan anak kunci palsu atau perintah palsu

* Pasal 365 ayat (3) :

Jika perbuatannya mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara selama lima belas tahun

* Pasal 365 ayat (4) :

1. Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup
2. Jika perbuatannya tersebut menyebabkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih, disertai pula oleh salah satuhal yang diterangkan pada No 1 dan 3.[[48]](#footnote-48)

**5. Tindak Pidana Pencurian dengan Penjatuhan Hak ( Pasal 366 KUHPidana )**

Dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362, 363, dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 No 1-4.

Unsur – Unsur dalam Pasal 366 :

1. Hal pemidanaan
2. Perbuatan
3. Yang dirumuskan dalam Pasal 362, 363, dan 365
4. Pencabutan Hak.[[49]](#footnote-49)

**6.Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga ( Pasal 367 KUHPidana )**

1. Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak berpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana
2. Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan atau jika dia keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mengkin diadakan penutupan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
3. Jika menurut lembaga matriarkhal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat diatas berlaku juga untuk orang itu.

Menurut pasal 367 ayat (2) KUHPidana, apabila pelaku atau pembantu dari pencurian dari Pasal 362, 364, dan 365 adalah suami istri dari si korban dan mereja dibebaskan dan kewajiban tinggal bersama atau keluarga sedarah semenda boleh dilakukan penuntutan atas pengaduan si korban pencurian. Apabila pencurian dalam keluarga ini termasuk delik aduan relaif, yaitu kejahatan yang hanya dalam keadaan tertentu saja merupakan delik aduan. Apabila suami dan istri itu tidak dibebaskan dari kewajiban tinggal bersama, maka menurut Pasal 367 ayat (1) sama sekali tidak boleh dilakukan penuntutan.[[50]](#footnote-50)

**C. PEMIDANAAN**

**1. Pengertian Pemidanaan**

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan saksi dan juga tahap pemberian saksi dalam hukum pidana. Kata “ Pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seseorang penjahat atau seseorang yang melakukan tindak kejahatan. Pemidanaan mengandung konsekuensi – konsekuensi positif bagi terpidana, korban juga merupakan orang lain dalam masyarakat yang dirugikan oleh karena itu bagi seorang yang melakukan tindakan pidana harus diberikan hukuman agar tidak mengulangi kejahatannya kembali. Doktrin membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, menurut J.M Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :

Hukum materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut – turut, peraturan umum dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formilcmengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang haru di perhatikan pada kesempatan itu.

Menurut Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materiil dan formil sebagai berikut :

Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat – syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. sedangkan hukum formil adalah kumpulan aturan – aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang – orang tertentu, atu dengan kata lain mengatur cara bagaiman hukum pidana materiil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim srta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.[[51]](#footnote-51)

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materiil berisi tentang larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam saksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materiil.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan dpaat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi – konsekuensi positif bagi si pelaku terpidana. Korban juga orang lain dalam masyarakat. Pemberi pidana atau pemidanaan dapat benar – benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :

1. Pemberian Pidana oleh pembuat Undang – undang
2. Pemberian Pidana oleh orang yang berwenang
3. Pemberian Pidana oleh instansi pelaku yang berwenang

Dalam rancangan KUHPidana Juli 2016, tujuan pemidanaan ditentukan dalam pasal 51, yaitu pemidanaan bertujuan :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
3. Masyarakat terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang berguna.
4. Membebaskan rasa bersalah terhadap terpidana.[[52]](#footnote-52)

**2. Teori Pemidanaan**

Teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana, berkembangnya beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu :

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)
2. Teori Relatif atau Tujuan (*doeltheorien*)
3. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai dalam penjatuhan pidana.[[53]](#footnote-53)

Berikut adalah penjelasan dari golongan teori-teori diatas :

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori Pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijathukannya pidana. pidana secara mutlak ada karna dilakukan suatu kejahatan. Tindaklah perlu untuk memikirkan manfaat untuk menjatuhkan pidana itu, setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana bagi pelanggar. Oleh karna itu maka teori tersebut disebut teori Absolit. Pidana merupakan tuntutan mutlak bukan hanya suatu pidana yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.[[54]](#footnote-54)

Vos menunjukan bahwa teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku didunia luar. Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Selanjutnya Vos menunjuk contoh membalasan objektif, dimana dua orang pelaku yang seorang menciptakan akibat yang lebih serius dari yang lain dan akan dipenjara lebih berat.[[55]](#footnote-55)

Menurut Johanes Andreas tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan, tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant didalam bukunya Philosopy of Law sebagai berikut “Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan melainkan mencerminkan keadilan. Salah seorang tokoh penganut teori absolut yang terkenal yaitu Hegel berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.[[56]](#footnote-56)

1. Teori Relatif atau Tujuan (*doeltheorien*)

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevesi terjadinya kejahatan. Wujud pidana berbeda-beda : menakutkan, memperbaiki, atau membinaskan. Lalu dibedakan prevesi umum dan khusus. Prevesi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.[[57]](#footnote-57)

Menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif, karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana buknalah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu atau bermanfaat, oleh karna itu teori ini disebut teori tujuan (utilitarian theory). Dasar pembenarannya adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana ini dijatuhkan bukan karena yang membuat kejahatan melainkan orang jangan melakukan kejahatan.

Menurut Karl O. Christiansen adanya pembedaan pokok atau perbedaan karakteristik antara teori retributif dan teori utilitarian yaitu :

1.Teori Retribution :

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan mesyarakat.
3. Keseluruhan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana penjara.
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
5. Pidana melihat kebelakang ; ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2.Teori Utilitarian :

1. Tujuan pidana adalah pencegahan.
2. Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat.
3. Hanya pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
4. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
5. Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif) ; pidana dapat mengandung unsur pelecehan tetapi baik unsur pelecehan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila untuk membantu pengcegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.[[58]](#footnote-58)

3. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan dari teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan hukum adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat,[[59]](#footnote-59)

**3. Jenis – Jenis Sanksi Tindak Pidana**

Dalam Pasal 10 KUHPidana pemidanaan dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu :

1. **Hukuman Pidana Pokok**
2. Pidana mati;
3. Pidana penjara;
4. Pidana kurungan; dan
5. Pidana denda;
6. Pidana tutupan
7. **Hukuman Pidana Tambahan**
8. Pencabutan hak-hak tertentu
9. Perampasan barang-barang tertentu; dan
10. Pengumuman putusan hakim

Berikut ini penjelasan tentang pemidanaan menurut **Pasal 10 KUHPidana** :

1. **Hukum Pidana Pokok :**
2. **Hukuman Mati**, ialah suatu hukuman yang dijatuhi pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat.[[60]](#footnote-60)
3. **Hukuman Penjara,** ialah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut didalam sebuah lembaga permasyarakatan, dengan diwujudkan menaati semua perbuatan tata tertib yang berlaku didalam penjara. Pidana penjara miniman satu hari sampai seumur hidup.
4. **Hukuman Kurungan,** ialah sifat kurungan pidana pada dasarnya sama dengan pidana pejara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan, sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagaimana telah dinyatakan pada Pasal 18 KUHP.
5. **Pidana Denda,** ialah pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang dewasa. Pidana denda ialah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda oleh hakim/pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karna itu ia telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana.[[61]](#footnote-61)

**2. Hukum Pidana Tambahan :**

Penjathuan dari pidana tambahan itu sifatnya adalah fakulatif, dalam arti bahwa hakim itu tidak slalu menjatuhkan pidana tambahn bagi setaip terdakwa yang diadili. Pidana tambahan meliputi :

**Pencabutan Hak Tertentu** sifatnya sementara, kecuali jika terpidana telah dijatuhi dengan pidana penjara seumur hidup. Adapun hak-hak yang dapat dicabut yaitu :

1. Hak – hak memegang jabatan tertentu
2. Hak memasuki angkatan bersenjata
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum
4. Hak menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum, wali pengawas, pengampu pengawas, atau orang yang bukan anak sendiri
5. Hak untuk menjalankan kekuasaan bapak, perwalian atau pengampunan atas anak sendiri
6. Hak menjalankan pekerjaan tertentu.
7. **Perampasan barang tertentu** ialah perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda ada 2 macam barang yang dapat dirampas, yaitu barang yang didapat karna kejahatan dan barang yang didapat dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Perampasan bisa dilakukan dengan hal kejahatan keuangan. Benda yang dirampas dieksekusi dengan jalan lelang dimuka umum oleh jaksa, kemudian hasilnya disetor ke kas bebgara sesuai dengan pos hasil dinas kejaksaan.
8. **Pengumuman putusan Hakim**, yaitu apabila hakim memerintah supaya putusan diumumkan berdasarkan perundang-undangan atau aturan umum lainnya maka harus ditetapkan bagaimana cara pelaksanaanya perintah atas biaya terpidana. Apabila terpidana tidak membayar biaya pengumuman putusan tersebut, maka diganti dengan pidana penjara atau kurungan penganti denda. Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. Putusan tersebut biasanya disiarkan melalui televsi, radio, surat kabar, dsb.[[62]](#footnote-62)

Adapun mengenai kualifikasi urutan-urutan dari jenis-jenis pidana tersebut didiasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, biasanya bersifat fakulatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkeuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keseharusan.

Perbedaan pidana Pokok dan pidana Tambahan dijelaskan sebagai berikut :

1. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah )pidana tambahan ini dapat ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).
2. Pidana tambahan mempunyai keharusan sebagaimana halnya pada pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultarif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusam).
3. Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu tidak dengan suatu tindakan eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari putusan hakim dapat dijalankan.

**D. Pengertian Elpiji**

Elpiji, pelafalan bahasa Indonesia dari akronim bahasa Inggris; LPG (liquified petroleum gas, harafiah: "gas minyak bumi yang dicairkan"). Dengan menambah tekanan dan menurunkan suhunya, gas berubah menjadi cair. Komponennya didominasi propana (C3H8) dan butana (C4H10). Elpiji juga mengandung hidrokarbon ringan lain dalam jumlah kecil, misalnya etana (C2H6) dan pentana (C5H12).Dalam kondisi atmosfer, elpiji akan berbentuk gas. Volume elpiji dalam bentuk cair lebih kecil dibandingkan dalam bentuk gas untuk berat yang sama. Karena itu elpiji dipasarkan dalam bentuk cair dalam tabung-tabung logam bertekanan. Untuk memungkinkan terjadinya ekspansi panas (thermal expansion) dari cairan yang dikandungnya, tabung elpiji tidak diisi secara penuh, hanya sekitar 80-85% dari kapasitasnya. Rasio antara volume gas bila menguap dengan gas dalam keadaan cair bervariasi tergantung komposisi, tekanan dan temperatur, tetapi biasaya sekitar 250:1. Tekanan di mana elpiji berbentuk cair, dinamakan tekanan uap-nya, juga bervariasi tergantung komposisi dan temperatur; sebagai contoh, dibutuhkan tekanan sekitar 220 kPa (2.2 bar) bagi butana murni pada 20 °C (68 °F) agar mencair, dan sekitar 2.2 MPa (22 bar) bagi propana murni pada 55 °C (131 °F).[[63]](#footnote-63)

LPG digunakan sebagai bahan bakar untuk rumah tangga dan industri. LPG terutama digunakan oleh masyarakat tingkat menengah keatas yang kebutuhannya semakin meningkat dari tahun ketahun karena termasuk bahan bakar yang ramah lingkungan. Sebagai bahan bakar untuk keperluan rumah tangga, LPG harus memenuhi beberapa persyaratan khusus dengan tujuan agar aman dipakai dalam arti tidak membahayakan bagi si pemakai dan tidak merusak peralatan yang digunakan serta effisien dalam pemakaiannya. Oleh sebab itu untuk menjaga faktor keselamatan, LPG dimasukan ke dalam tabung yang tahan terhadap tekanan yang terbuat dari besi baja dan dilengkapi dengan suatu pengatur tekanan. Disamping itu untuk mendeteksi terjadinya kebocoran LPG, maka LPG sebelum dipasarkan terlebih dahulu ditambahkan zat pembau (odor) sehingga apabila terjadi kebocoran segera dapat diketahui. Pembau yang ditambahkan harus melarut sempurna dalam LPG, tidak boleh mengendap. Untuk maksud itu digunakan etil merkaptan (C2H5SH) atau butil merkaptan (C4H9SH). Sedangkan dibidang industri produk elpiji digunakan sebagai pengganti freon, aerosol, refrigerant / cooling agent, kosmetik dan dapat pula digunakan sebagai bahan baku produk khusus.[[64]](#footnote-64)

**Sifat umum Gas Elpiji :**

1. Cairan dan gasnya sangat mudah terbakar
2. Gas tidak beracun, tidak berwarna dan biasanya berbau menyengat
3. Gas dikirimkan sebagai cairan yang bertekanan di dalam tangki atau silinder.
4. Cairan dapat menguap jika dilepas dan menyebar dengan cepat.
5. Gas ini lebih berat dibanding udara sehingga akan banyak menempati daerah yang rendah.

Sifat Gas LPG yang harus diperhatikan dalam penggunaannya yaitu :

1. Gas bersifat Flammable (Mudah Terbakar). Dalam batas Flammable. LPG adalah sumber api terbuka. Sehingga letup (Percikan Api) yang sekecil apapun dapat segera menyambar Gas LPG. Namun untuk terjadinya sebuah kebakaran dibutuhkan volume LPG yang cukup yang membuat LPG tersebut terbakar dan meledak (Seperti terjadinya kebakaran yang akhir2 ini marak di Indonesia). Besar kecilnya daya ledak tergantung dari volume Gas yang biasanya berada dalam ruang tertutup dimana terjadi kebocoran, oleh karena itu ventilasi sangat penting sehingga pabila terjadi kebocoran tidak menyebabkan kebakaran atau bahkan ledakan. Sebagai catatan karena Gas ini merambat dibawah sehingga sebaiknya ventilasi berada di bawah.
2. Sensitive terhadap Api.
3. Jika terjadi kebocoran, LPG akan cenderung berputar-putar secara lamban di atas permukaan lantai/tanah, karena berat jenis LPG lebih besar dari berat jenis udara. Berat jenis Propana satu setengah kali berat jenis udara, sedang berat jenis butana dua kali berat jenis udara. Kebocoran LPG yang merambat di lantai kadangkala belum tercium oleh orang yang sedang berdiri. Dengan demikian, ketika mulai tercium, berarti volume LPG yang keluar sudah setinggi orang yang menciumnya. Untuk itu, demi keamanan, upayakan agar di permukaan lantai di sekitar LPG ada sirkulasi udara, bisa dengan lubang ventilasi atau memasang Exhaust Fan. agar kebocoran LPG sedikit saja bisa langsung tercium atau bisa dinetralkan oleh angin, atau bisa juga dengan memasang alarm LPG di dekat permukaan lantai.
4. Komponen LPG merupakan pelarut yang baik untuk karet, sehingga perlu diperhatikan komponen-komponen karet yang bersentuhan dengan LPG, agar tidak longgar yang bisa menimbulkan kebocoran.
5. Tekanan LPG cukup besar, sehingga bila terjadi kebocoran LPG akan berubah menjadi Gas secara cepat, memuai. dan menjadi sumber api terbuka yang mudah terbakar. Satu kilogram LPG berpotensi berubah menjadi 500 liter Gas yang menempati permukaan lantai.
6. Usahakan tabung tidak terpapar panas, karena panas dapat memicu memuainya Propana di dalam tabung. Tekanan Propana ini cukup besar dan bisa memicu ledakkan. Untuk keamanan, aturlah jarak tabung dengan Kompor Gas (Sebagai Sumber Panas) sedemikian rupa agar tabung tidak terpapar panas.
7. Propana memiliki Titik Beku yang besar, sehingga jika dirasa dingin di sekitar katup tabung, patut dicurigai telah terjadi kebocoran LPG.
8. Jika warna api sudah mulai merah (Tidak Biru Transparan) patut dicurigai adanya kotoran yang ikut terbakar, yang bisa mengganggu aliran LPG ke kompor.[[65]](#footnote-65)

**Jenis-jenis Gas LPG**

Menurut spesifikasinya, Elpiji dibagi menjadi Tiga Jenis yaitu Elpiji campuran, Elpiji Propana dan Elpiji Butana. Spesifikasi masing-masing Elpiji tercantum dalam **Keputusan Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi Nomor: 25K/36/DDJM/1990**Elpiji yang dipasarkan Pertamina adalah Elpiji campuran.

Berdasarkan komposisi Propana dan Butane, LPG dapat dibedakan menjadi tiga macam:

1. LPG Propana, yang sebagian besar terdiri dari C3. Adalah Elpiji yang masing-masing mengandung Propana 95% volume dan diberi Odorant (Mercaptant), umumnya digunakan untuk bahan bakar pemotong, bahan di industri-industri sebagai pendingin, untuk menyemprot cat, dll.
2. LPG Butane, yang sebagian besar terdiri dari C4. Adalah Elpiji yang masing-masing mengandung Propana butana 97,5 % volume dan diberi Odorant (Mercaptant), umumnya digunakan untuk bahanbakar memasak, korek api, dll.
3. Mixed LPG, yang merupakan campuran dari Propana dan Butane dengan komposisi antara 70- 80% dan 20-30% volume dan diberi Odorant (Mercaptant) dan umumnya digunakan untuk bahan bakar memasak.[[66]](#footnote-66)

Penggunaan Gas LPG di Indonesia terutama adalah sebagai bahan bakar alat dapur (Terutama kompor Gas). Selain sebagai bahan bakar alat dapur, Gas LPG juga cukup banyak digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor (Walaupun Mesin Kendaraannya harus dimodifikasi terlebih dahulu). Secara umum LPG (Liquified Petroleum Gases) dapat digunakan sebagai :

1. Bahan Bakar dalam rumah tangga dan Industri
2. Bahan Bakar Mesin pembakaran dalam (Internal Combustion Engine) Karena zat Propana mempunyai Angka Oktan (Octane Number) yang tinggi (ON = 97), maka untuk dapat memperoleh ke-ekonomian Bahan Bakar, harus digunakan mesin dengan perbandingan komposisi tinggi (10 : 1).
3. Sebagai bahan baku Kilang Petrokimia.[[67]](#footnote-67)

**Tabung Baja Elpiji**

1. Badan Tabung

Tabung yang dibuat dari plat baja Karbon Canai panas yang digunakan untuk menyimpan gas LPG (liquid petrolium gas) dengan pengisian antara 3kg (7,3 liter) sampai 50kg (108 liter) dam memiliki rancang bangunan minimum 18,6 kh/cm2.

1. Tabung baja LPG diklasifikasikan menjadi :
2. Kontruksi 2 bagian : 3 kg sampai dengan maksimal 12 kg.
3. Kontruksi 3 bagian : 15 kg sampai dengan maksimal 50 kg.

3. Syarat bahan baku

Bahan untuk tabung sesuai dengan SNI-07-3018-2006, baja lemvbaran plat dan gulungan cantai panas untuk tabung gas (Bj TG) atau JIS 3116 kelas SG 26 (SG 225). SG 30 ( SG 295)

**Kontruksi**

Tabung terdiri dari :

1. Bagian atas dan bagian bawah (top&bottom) untuk kontruksi 2 (dua) bagian dan untuk kontruksi 3 (tiga) bagian, bagian terdiri dari bagian atas, tengan dan bawah.
2. Cincin leher ( neck ring).
3. Pegangan tangan (hand guard)
4. Cincin kaki (foot ring).[[68]](#footnote-68)

**E. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Islam**

Dalam teori hukum Islam, syariat diturunkan oleh Allah dalam bentuk hukuman ta’lif baik berupa saruhan maupun larangan tidak lain untuk mewujudkan dan melestarikan keselamatan umat manusia baik dunia maupun dihari kemudian. Untuk itu harus terwujud dan terpelihara 5 pokok kebaikan hidup yang bersifat primer, yaitu :

1. Kejahatan terhadap jiwa
2. Kejahatan terhadap agama
3. Kejahatan terhadap akal
4. Kejahatan terhadap keturunan dan kehormatan
5. Kejahatan terhadap harta[[69]](#footnote-69)

Dalam hukum Islam tindak pidana pencurian dibagi menjadi 2, yaitu :

1. Pencurian yang hukumnya had
2. Pencurian yang hukumnya ta’zir

Pencurian yang hukumnya had dibagi menjadi 2, yaitu :

1. Pencurian ringan
2. Pencurian berat

Pencurian yang hukumnya ta’zir dibagi menjadi 2, yaitu :

1. Semua jenis hukuman di kenai hukuman had, tetapi syarat-syarat tidak terpenuhi atau syubhat
2. Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemiliknya mengambil dengan paksaan atau kekerasan.[[70]](#footnote-70)

**Sumber Hukum**

Dalam suatu konteks hukum pidana Islam sendiri sebagian besar ahli hukum Islam (jumhur fugaha) sependapat bahwa sumber hukum pidana Islam itu ada empat yang secara hirarkis berdasarkan urutan-urutan kedudukan dan kepentingannya tersusun sebagai berikut :

1. Al – Quran
2. As Sunnah
3. Ijma’
4. Qiyas

Penggunaan keempat sumber hukum tersebut diatas didasarkan pada ketentuan Al- Quran surat An Nisa’ Ayat 59 yang bunyinya sebagai beikut :

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً**

*Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya danUlil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentangsesuatu (masalah), maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (As Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.”[[71]](#footnote-71)*

Berdasarkan terjemahan atau arti Al-Quran surat An Nisa’ Ayat 59 di atas, diketahui bahwa perintah menaati Allah dan Rasul-Nya mengandung arti perintah untuk mengikuti Al-Quran dan Hadist tersebut. Kemudian perintah mengikuti Ulul Amri diantara muslim, artinya ialah mengikuti hukum-hukum yang telah disepakati (di-ijma’-i) oleh para mujtahidin (pembaharu hukum islam). Karena mereka itulah Ulil Amri bagi umat Islam dalam pembentukan hukum Islam.[[72]](#footnote-72)

**DALIL AL-QURAN TENTANG HUKUMAN MELAKUKAN PENCURIAN**

Dalam Al-Quran memuat dalil hukum melakukan pencurian Allah telah berfirman yaitu yang pertama QS Al-Maidah ayat 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Artinya : ”Lelaki dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Kuasa dan Maha Bijaksana.”[[73]](#footnote-73)*

Berdasrkan ayat diatas dinyatakan bahwa tindak pidana pencurian sanksi hukumannya adalah dipotong tangannya, baik laki-laki maupun perempuan sebagai siksaan dari Allah. Namun demikian tidak semua kasus pencurian dalam Isalm harus dipotong tangannya bila tidak memenuhi syrat-syarat pencurian.

Hukuman potong tangan dalam pencurian hanya dijatuhkan jika terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Harta yang dicuri itu diambil secara diam-diam tanpa diketahui. Diambil berarti harta itu sudah berpindah dari tempat penyimpanan dan sudah berpindah dari penguasaan si pemilik ke penguasaan si pencuri.
2. Barang yang dicuri harus disimpan dalam tempat yang aman, baik dalampengelihatan maupun di suatu tempat yang aman (hirz).
3. Barang yang dicuri harus memiliki nilai. Hukuman potong tangan tidak akan dijatuhkan bagi pencuri rumput atau pasir atau juga pencuri barang-barang yang tidak ilegal, seperti minuman anggur atau daging babi.
4. Barang yang dicuri harus milik orang lain. Sebagai konsekuensi, hukuman potong tangan tidak dijatuhkakn jika harta yang dicuri telah milik si pencuri atau jika ia memiliki sebagian dari barang itu atau ia memiliki hak (tittle) atau barang itu.
5. Pencurian itu harus mencapai nilai minimum tertentu (nisab). Imam Malik mengukur nisab tadi sebesar seperempat dinar atau lebih. Sedangkan Imam Abu Hanifat menyatakan bahwa nisab pencurianitu senilai sepuluh dirham atau satu dinar.

Menurut Imam Abu Hanifah, “tidak wajib dikenai hukuman potong tangan pada pencurian harta dalam keluarga yang mahram, karena mereka diperbolehkan keluar tanpa izim.”

Menurut Imam Syafii dan Imam Amad, “seorang ayah tidak dikenai hukuman potong tangan karena mencuri harta anaknya, cucunya, dan seterusnya sampai ke bawah. Demikian pula sebaliknya, anak tidak dapat dikenai sanksi potongn tangan jika mencuro harta ayahnya, kakeknya, dan seterusnya sampai keatas.”

Menurut Imam Abu Hanifah “tidak ada hukuman potonh tangan pada kasus pencurian antara suami-istri”.[[74]](#footnote-74)

Lalu QS Al-Maidah ayat 39 berfirma**n**

**فَمَن تَابَ مِنۢ بَعْدِ ظُلْمِهِۦ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ**

*Artinya : ”Maka barang siapa bertaubat (diantara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.’[[75]](#footnote-75)*

Dalam dua ayat tersebut diatas dijelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan tindakan mencuri maka hukumnya sama yaitu dipotong kedua tangannya. Maka dari itu barangsiapa yang melakukan hal tersebut hendaklah bertaubat karena Allah Maha Pengampun dan menerima taubat dari manusia yang bersungguh-sungguh ingin melakukan taubat dan berserah diri kepada Allah Yang Maha Esa.

Hadits-hadits hukuman bagi tindak pidana pencurian :

Setelah membahas dalil Al-Quran tentang pencurian maka sekarang kita akan membahas tentang hadits-hadits yang diriwayatkan oleh para Nabi SAW. Brikut adalah hadits-hadits yang dijelaskan :

*“Dari 'Aisyah bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak boleh dipotong tangan seorang pencuri, kecuali sebesar seperempat dinar atau lebih." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut riwayat Muslim. Menurut Lafadz Bukhari: "Tangan seorang pencuri dipotong (jika mengambil sebesar seperempat dinar atau lebih." Menurut riwayat Ahmad: "Potonglah jika mengambil seperempat dinar dan jangan memotong jika mengambil lebih kurang daripada itu."*

*“Dari Ibnu Umar RA, bahwasannya Nabi SAW memotong tangan pencuri perisai yang harganya tiga dirham.( HR. Muttafaq ‘alaih)”*

*“Dari Abdurrahman Ibnu Auf Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Pencuri tidak perlu mengganti jika telah dijalankan hukuman atasnya." Riwayat Nasa'i dan ia menjelaskan bahwa hadits ini munqothi'. Abu Hatim berkata: Hadits ini munkar.”*

**BAB III**

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. **Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini**

Tindak Pidana Pencurian diatur dalam Pasal 362 sampai 367 KUHP, yang dijelaska seperti dibawah ini :

### Pasal 362 KUHP

### “Barang siapa mengambil barang, sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun pidana atau pidana denda paling banyak semilan ratus rupiah.”[[76]](#footnote-76)

### Pasal 363 KUHP

### (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

### perncurian ternak;

### pencurian pada waktu ada kebarakan, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal keram, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pembertontakan, atau bahaya perang;

### pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;

### pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

### pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

### (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalambutir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.[[77]](#footnote-77)

### Pasal 364 KUHP

### “Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama lima bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”[[78]](#footnote-78)

### Pasal 365 KUHP

### (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencuriandidahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancamankekerasan,terhadaporang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencuria, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

### (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun;

### jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

### jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

### jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

### jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

### (3) Jika perbuatan menyebabkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

### (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktutertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan menyebabkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam Nomor 1 dan 2.[[79]](#footnote-79)

### Pasal 366 KUHP

### “Dalam hal pemindahan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 362, 363, dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 Nomor 1-4.”[[80]](#footnote-80)

### Pasal 367 KUHP

### Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam babi ini, adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.

### Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

### Jika menurut lembaga matriakal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat diatas berlaku juga bagi orang itu.[[81]](#footnote-81)

1. **Proses Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Gas LPG di Pengadilan Negeri Ungaran, Kab. Semarang (Studi Putusan No. 150/Pid.B/2012/PN.Ung.)**

Tindakan pidana merupakan tindakan yang melawan hukum yang dilakukan seseorang baik secara sengaja ataupun tidak sengaja yang nantinya tindakan mereka akan dipertanggung jawabkan oleh Undang-Undang dan dinyatakan sebagai suatu tindakan / perbuatan yang dapat dihukum. Maka dari itu jika seseorang melakukan perbuatan pidana harus di pertanggungjawabkan.

Dalam hal ini Peneliti membahas tentang Tindak Pidana Pelaku Pencurian Gas LPG dalam studi kasus No. 150/Pid.B/2012/PN.Ung.

### Identitas Pelaku :

Berikut adalah identitas terdakwa tindak pidana pencurian Gas LPG di Kab. Semarang, yaitu :

1. Nama Lengkap : BN alias JABRIK Bin S ;

Tempat lahir : Kabupaten Semarang ;

Umur / Tanggal Lahir : 33 tahun / 11 Agustus 1979 ;

Jenis Kelamin : Laki – Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal :Lingkungan Bapang 4 Kelurahan Harjosari, Kecamatan bawen, Kabupaten Semarang atau sesuai KTP Dusun Balekembang RT. 04 RW. 03 Desa Kandangan, Kec. Bawen, Kabupaten Semarang

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pengangguran ;

1. Nama Lengkap : DU ( DPO )

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik : tanggal 13 Oktober 2012, Nomor : SP.Han / 359 / X / 2012/ Reskrim sejak tanggal 13 Oktober 2012 s/d tanggal 01 Nopember 2010;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : tanggal 29 Oktober 2012, Nomor : B.1052/0.3.42/Epp.1/10/2012 sejak tanggal 02 Nopember 2012 s/d tanggal 11 Desember 2012 ;
3. Penuntut Umum : tanggal 07 Desember 2012, Nomor : PRINT- 1284/0.3.42/Epp.1/10/2012 sejak tanggal 07 Desember s/d tanggal 26 Desember 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 12 Desember 2012, Nomor : 230 / Pen.Pid / 2012 / PN.Ung. sejak tanggal 12 Desember 2012 s/d tanggal 10 Janurai 2013 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri tanggal 02 Januari 2013 Nomor : 230 / Pen.Pid / 2012 / PN.Ungg. sejak tanggal 11 Januari 2013 s/d tangal 11 Maret 2013;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran No. 150/Pen.Pid/2012/PN.Ung tanggal 12 Desember 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar :

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambarawa No. Reg. Perkara : PDM- 141 /0.3.42/Epp.2/12/2012 tanggal 07 Desember 2012;

- Keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;

### Dakwaan

### Bahwa terdakwa BN alias JABRIK bin SULAIMAN baik secara bersama – sama atau masing – masing bertindak sendiri sendiri dengan DU (DPO), pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012 sekitar jam 00.15 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2012, bertempat di Lingkungan Bapang RT.01 RW.09 Kelurahan Harjosari Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran yang berswenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atu memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :

Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2012 sekitar jam 16.00 WIB, DU (DPO) datang ke kos terdakwa dan mengajak untuk mencari sasaran, setelah mendapat sasaran kemudian terdakwa dan DU (DPO) pulang kerumah masing – masing, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012 sekitar jam 00.15 WIB DU (DPO) datang lagi menghampiri terdakwa dan kemudian terdakwa dan DU (DPO) berangkat menuju sasaran, sesampainya ditempat sasaran dilakukan pembagian tugas dimana terdakwa mengawasi situasi sekitar dan DU (DPO) merysak pintu gembok pintu warung / toko milik saksi SUDARNO Bin SUWANTO (alm) dan akhirnya terdakwa DU (DPO) berhasil membuka pintu warung / toko, kenudian terdakwa dan U (DPO) bersama-sama masuk ke dalam warung / toko mengambil ***6 (enam) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau, 20 (dua puluh) kg beras, uang tunai kurang lebih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu), rokok Marlboro merah, Djisamsu, Dunhil, LA merah, Sampoerna Mild hijau, Aroma, Djarum 76 Kretek, Djarum Super, Gudang Garam Surya, Sukun Filter, Diplomat, Djarum Black, Rindang, rook Apache yang semuanya berjumlah 5 (lima) bungkus, 1 (satu) buah Deterjen merk Rinso ukuran berat 1kg*, s**elanjutnya barang berupa 6 (enam) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau disembunyikan diselokan pinggir jalan Raya oleh terdakwa dan DU (DPO) agar tidak ketahuan, dan barang yang lainnya dibawa pulang, kemudian pagi harinya pada tanggal 9 Oktober 2012 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa ke tempat kos saksi KUNARTI Binti (Alm) DASUKI yang beralamat di Lingkungan Merakarjo Kelurahan Harjosari kec. Bawen kab. Semarang dengan maksud terdakwa menawarkan barang berupa : 6 (enam) buah tabung gas ukuran 3kg warna hijau yang masih terdakwa sembunyikan, kemudian terdakwa menawarkan kepada KUNARTI Binti (Alm) DASUKI per buah tabung gas seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), akan tetapi saksi KUNARTI mengatakan tidak memiliki uang dan kemudian terdakwa pulang ketempat kosnya, sedangkan barang berupa ***20 (dua puluh) kg bera, uang tunai kurang lebih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu), rokok Marlboro merah, Djisamsu, Dunhil, LA merah, Sampoerna Mild Hijau, Aroma, Djarum Super, Djarum 76 kretek, Gudang Garam Surya, Sukun Filter, Diplomat, Djarum Black, Rindang, dan rook Apache yang semuanya berjumlah 5 (lima) bungkus, tanpa seizin saksi korban telah dijual pada orang lain dimana terdakwa mendapatkan bagian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan bagiannya tersebut telah habis digunakan untuk mencukupi kebutuhannya sendiri,*** Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SUDARNO Bin SUWANTO mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih senilai Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) atai setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus liam puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana.**

**Surat dakwaan** adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan, penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan.

**a. Bentuk surat Dakwaan antara lain :**

1. Dakwaan Tunggal

Dalam surat dakwaan ini hanya ada satu Tindak Pidana yang didakwakan karna terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya;

1. Dakwaan Alternatif

Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif fan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutan-urutannya dan jika salah satu terbukti maka terdakwa pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk surat dakwaan ini antara lapisan satu dan yang lainnya menggunakan kata sambung “atau”.

Contoh dakwaan alternatif :

Pertama : Pencurian ( Pasal 362 KUHP)AtauKedua : Pendadahan ( Pasal 480 KUHP )

1. Dakwaan Subsidair

Sama halnya dengan dakwaan altenatif, dakwaan subsidair juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematik lapisan disusun secara berturut dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana tertinggi samapi dengan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana terendah.

Pembuktiaan dalam surat dakwaan ini harus dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan selanjutnya. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan.

Contoh dakwaan Subsidair :

**Primair** : Pembunuhan berencana ( Pasal 340 KUHP )

**Subsidair** : Pembunuhan ( Pasal 338 KUHP )

1. Dakwaan Kumulatif

Dalam surat dakwaan ini, didakwakan beberapa Tindak Pidana sekaligus. Kesemua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakakn secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal Terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri.

Contoh dakwaan Kumulatif :

Kesatu : Pembunuhan ( Pasal 338 KUHP )**dan**Kedua : Pencuurian dengan Pemberatan ( Pasal 363 KUHP )**dan**Ketiga : pemerkosaan ( Pasal 285 KUHP )’

1. Dakwaan Kombinasi

Disebut dakwaan kombinasi kaewna didalam bentuk ini di kombinasikan atau digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidair.

Contoh dakwaan kombinasi :

Kesatu **: Primair** : Pembunuhan berencana ( Pasal 340 KUHP )

**Subsidair** : Pembunuhan biasa ( Pasal 338 KUHP )**dan**

Kedua : **Primair** : Penciurian dengan Pemberatan ( Pasal 363 KUHP )

**Subsidai**r : Pencurian( Pasal 362 KUHP )

## b. Syarat surat Dakwaaan

## Dalam Pasal 143 KUHP ditentukan syarat yang harus dipenuhi dalam surat Dakwaan, yaitu :

1. **Syarat Formil :** surat dakwaan diberi tanggal dan di tandatangai oleh Penuntut Umum.

memuat nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan dan pendidikan terdakwa.

1. **Syarat Materiil :** memuat 2 unsur yang tidak dapat dilalaikan yaitu, uraian secara cermat, lengkap dan jelas mengenai tindak pidana yang didakwakan, dan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukanm ( tempus delicti dan locus delicti ).

## Tujuan Surat Dakwaan

1. Dari sisi penuntutan, tujuan surat dakwaan adalah sebagai dasar bagi Penuntut Umum untuk melakukan tuntutan hukum karna jaksa memiliki kekuasaan yang mutlak melakukan tuntutan hukum bagi setiap warga negara yang melakukan pelanggaran hukum.
2. Dari sisi Terdakwa, tujuan utama dari surat tuntutan adalah bahwa Undang – Undang ingin melihat ditetapkannya alasan – alasan yang menjadi dasar penuntutan suatu peristiwa pidana. untuk itu sifat khusus dari suatu tindakan pidana yng telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik – baiknya. Terdakwa mengetahui hal sekecil – kecilnya terntang perbuatan yang dilakukan dan dapat mempersiapkan pembelaan atas itu.
3. Dari sisi Pengadilan, bahwa tujuan surat dakwaan adalah sebagai dasar hukum untuk memeriksa perkara dalam persidangan.

## Fungsi Surat Dakwaan

Fungsi surat dakwaan yaitu ditinjau dari beberapa kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana yang dikategorikan sebagai berikut:

* Bagi Jaksa Penuntut Umum : surat dakwaan sebagai dasar pembuktian yuridis dari suatu tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum.
* Bagi seorang Terdakwa : surat dakwaan berfungsi sebagai dasar dalam mempersiapkan suatu pembelaan atas suatu dakwaan terhadap suatu tindakan pidana yang dituduhkan kepadanya.
* Bagi seorang Hakim : surat dakwaan berfungsi sebagai dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan persidangan, serta dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan pidana.[[82]](#footnote-82)

## Penuntut Umum

## Pada Pasal 1 butir 6 KUHP dijelaskan sebagai berikut :

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Dilihat dari penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa “jaksa” adalah menyangkut jabatan, sedangkan “penuntut umum” menyangkut fungsi.

Hal Penuntut Umum diatur dibagian ketiga Bab IV KUHAP. Wewenang Penuntut Umum dalam bagian ini hanya diatur dalam 2 buah pasal, yaitu Pasal 14 dan Pasal 15. Dalam Pasal 14 diperinci wewenang tersebut sebagai berikut :

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyelidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
2. Mengadakan prapenentuan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam penyempurnaan penyidikan dan penyidik.
3. Memberi perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
4. Membuat surat dakwaan;
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang sidang yang telah ditentukan.
7. Melakukan penuntutan;
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
10. Melaksanakan penetapan hakim.[[83]](#footnote-83)
11. **Ketua Pengadilan**

Tugas pokok dan fungsi ketua pengadilan, yaitu :

1. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi hakim maupun seluruh kariyawan.
2. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara serta mengawasi keuangan rutin / pembangunan.
3. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melaksanakan pengawasan atas :

* Penyelengaraan peradilan dan pelaksanaan tugas para hakim, pejabat kepanitraan, sekertaris dan jurusita didaerah hukumnya.
* Masalah – masalah yang timbul.
* Masalah eksekusi yang ada diwilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan ke Mahkamah Agung.
* Masalah tingkah laku / perbuatan hakim, pejabat kepaniteraan, sekertaris dan jurusita didaerah hukumnya.
* Memberi ijin berdasarkan ketentuan – ketentuan Undang – Undang untuk membawa keluar dari ruang kepaniteraan : daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara.
* Menempatkan panjar biaya perkara ( dalam hal penggugat atau terguggat tidak mampu, kedua dapat mengizinkan untutk beracara secara prodeo atau tanpa biaya perkara.[[84]](#footnote-84)

1. **Hakim**

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang – Undang untuk mengadili ( Pasal 1 butir 8 KUHP ). Sedangkan istilah Hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah; Hakim juga berarti Pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim”. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselengaranya hukum Republik Indonesia ( Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UUD No. 48/2009). Berhakim berarti meminta untuk diadili perkaranya; menghakimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap seseorang; kehakiman artinya urusan hakim dan pengadilan, adakalanya istilah hakim dipakai terhadap seseorang budiman ahli, dan orang yang bijaksana.

Hakim didalam menjalankan tugasnya wajib menjaga kemandirian peradilan, segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal – hal sebagimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan perundang – undangan ( Pasal 2 UU No. 48 Tahun 2009).

**Kewajiban Hakim :**

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara ( mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang – Undang ini ( Pasal 1 ayat (9) KUHPP). Ia tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karna itu hakim dianggap mengetahui hukum maka jika aturan hukum tidak ada ia harus menggalinya dengan ilmu pengetahuan hukum, dan jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkan dan jika tidak ada aturan hukum tertulis ia dapat menggunakan hukum adat.

Hakim sebagai pejabat Negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dan Hakim Konstitusi harus memiliki intergritas dan keperibadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dalam bidang Hakim. Hakim dan Hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ( Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009).

Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terkait hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat. Seseorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara (Pasal 17 Ayat (3-5) UU No. 48 Tahun 2009).

Hakim ketua dalam memeriksa perkara di persidangan wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang dapat dimengerti oleh para penggugat dan terguggat dan jatau terdakwa dan saksi ( Pasal 153 KUHP). Didalam praktik adakalanya hakim menggunakan bahasa daerah, jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkan atau dinyatakan oleh hakim.

Hakim ketua membuka sidang dengan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak – anak. Jika hakim dalam memeriksa perkara menggunakan bahasa yang tidak di mengerti oleh terdakwa atau saksi dan mereka tidak bebas memberikan jawaban, dapat berakibat putusan batal demi hukum.

**Peran Hakim dalam menjatuhkan Putusan**

Hakim berbeda dengan pejabat – pejabat lain, ia harus benar – benar menguasai hukum sesuai dengan sistem yang dianut di Indonesia dalam pemeriksaan disidang Pengadilan. Hakim harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh Penasihat Hukum untuk bertanya kepada saksi – saksi, begitu pula Penuntut Umum. Semua itu dimaksudkan untuk menemukan kebenaran materil dan pada akhirnya hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskan.[[85]](#footnote-85)

**Ada 5 tanggung jawab Hakim, yaitu :**

1. Justisialis Hukum; yang dimaksud justisialis adalah *meng-endalikan*. Jadi putusan Hakim yang dalam praktiknya memperhutungkan kemanfaatan *doel matigheid* perlu *di-adilkan.* Maka dari Hukum *de zin van het recht* terletak dalam *gerechtigheid* keadilan. Tiap putusan yang diambil dan dijatuhkan dan berjiwa keadilan, sebab ia adalah tanggung jawab jurist yang terletak dalam justisialisasi daripada hukum.
2. Penjiwaan Hukum; dalam berhukum *recht doen* tidak merosot menjadi satu adat yang hampa tanpa jiba, melainkan senantiasa diresapi oleh jiwa untuk berhukum. Jadi hakim harus memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberi putusan.
3. Pengintergrasian Hukum; hukum perlu senantiasa sadar bahwa hukum dalam kasus tertentu merupakan ungakapn daripada hukum pada umumnya. Oleh karna itu putusan Hakim pada kasus tertentu tidak hanya perlu diadakan dan dijiwakan melainkan perlu diintergrasikan dalam sistem hukum yang sedang berkembang oleh perundang – undangan, peradilan dan kebiasaan. Perlu dijaga supaya putusan hukum dapat diintergrasikan dalam hukum positif sehingga semua usaha berhukum senantiasa menuju ke pemulihan pola posisi asli *restitutio in intergram.*
4. Totalitas Hukum; maksudnya menempatkan hukum keputusan Hakim dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari dua segi hukum, dibawah ia melihat kenyataan ekonomis dan sosial, sebaliknya diatas Hakim melihat dari segi moral dan religi yang menuntut nilai – nilai kebaikan dan kesucian. Kedua tuntutan itu perlu dipertimbangkan oleh Hakim dalam keputusan hukumnya, di segi itu juga segi social– ekonomis menuntut pada hakim agar keputusannya memperhitungkan situasi dan pengaruh kenyataan segia sosial – ekonomis.
5. Personalisasi Hukum; personalisasi hukum ini mengkhususkan keputusan pada personal (keperibadian) dari para pihak yang memberi keadilan dalam proses. Perlu diingat dan disadari bahwa mereka yang berperkara adalah manusia yang berpribadi yang mempunyai keluhuran. Dalam personalisasi hukum ini munculkan tanggung jawab hakim sebagai pengayom (pelindung), disini hakim dipanggil untuk bisa memberi pengayoman kepada manusia – manusia yang wajib dipandang sebagai pribadi yang mencari keadilan.[[86]](#footnote-86)

**3. Penetapan Hari Sidang**

Penetapan hari sidang dilakukan oleh Hakim yang diajukan oleh Ketua Pengadilan untuk menyidangkan perkara. Pada Pasal 152 ayat 1 KUHP dijelaskan bahwa :

“dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenang ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakimnya yang ditunjuk itu menetapkan hari persidangan.”[[87]](#footnote-87)

Pasal 152 ayat 2 KUHP dijelaskan :

“Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang didalam pengadilan.”[[88]](#footnote-88)

KUHP mengatur dalam Pasal 145 syarat - syarat sah suatu pemanggilan kepada Terdakwa adalah sebgai berikut :

1. Surat pemanggilan terhadap Terdakwa disampaikan dialamat tempat tinggal atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui disampaikan dikediaman terakhir;
2. Apabila Terdakwa tidak ada ditempat tinggalnya atau ditempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa yang berdaerah ditempat tinggal Terdakwa atau tempat kediamannya;
3. Dalam hal terdakwa berada didalam tahanan surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumag tahanan negara;
4. Penerimaan surat panggilan terdakwa sendiri ataupun oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan;
5. Apabila tempat kediaman maupun tempat kediaman terakhir tidak dikenal, surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman digedung pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya;

Menurut ketentuan Pasal 152 ayat 2 KUHP tersebut maka, Penuntut Umum yang menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa Pasal 146 ayat 1 menentukan benar surat panggilan harus memuat : tanggal, hari sidang, serta jam sidang dan ubtuk perkara ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat – lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.[[89]](#footnote-89)

Setelah ditetapkan hari persidangan, lalu dilakukan persidangan yang ada beberapa hal, yaitu :

**a.Pembacaan Surat Dakwaan**

Surat dakwaan bagi terdakwa berfungsi untuk mengetahui sejauhmana terdakwa dilibatkan dalam persidangan. Dengan memahami surat dakwaan yang dibuat jaksa penuntut umum maka surat dakwaan tersebut adalah dasar pembelaan bagi dirinya sendiri. Sedangkan bagi hakim sebagai bahan (objek) pemeriksaan dipersidangan yang akan memberi corak dan warna terhadap keputusan pengadilan yang akan dijatuhkan.

Bagi jaksa penuntut umum, surat dakwaan menjadi dasar surat tuntutan (requisitori). Sesudah pemeriksaan selesai (ditutup) oleh hakim, maka penuntut umum membuat suatu kesimpulan bagian-bagian mana dan pasal-pasal mana dari dakwaan yang dinyatakan terbukti.[[90]](#footnote-90)

**b.Pemeriksaan Saksi**

Syarat menajdi seorang saksi pada umumnya semua orang dpaat menjadi saksi. Dalam Pasal 171 KUHAP kekecualian yang memberikan kesaksian dibawah sumpah ialah :

1. Anak yang dibawah umurnya belum cukup 15 ( lima belas ) tahun dan belum pernah kawin ;
2. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.[[91]](#footnote-91)

Dalam penjelasan pasal diatas dikaitkan bahwa anak belum berusia 15 (lima belas) tahun, demikian juga orang yang sakit ingatannya atau hilang ingatan, dan sakit jiwa yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut psychopaat, mereka tidak dapat dipertanggung jawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan.

Selanjutnya diteruskan dalam Pasal 186 KUHAP kekecualian menjadi saksi yaitu:

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama – sama sebagai terdakwa.
2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama – sama sebagai terdakwa, saudara ibu, saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan perkawinan, dan anak – anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
3. Suami atau isteri terdakwa mesipun sudah bercerai atau yang bersama – sama sebagai terdakwa.[[92]](#footnote-92)

**c.Keterangan Terdakwa**

Keterangan Terdakwa adalah apa yang Terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri (Pasal 189 Ayat (1).

Jadi keterangan Terdakwa sebagai “ alat bukti” harus dinyatakan disidang pengadilan. Keterangan Terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya ( Pasal 189 ayat (2) ).

Keterangan Terdakwa yang hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri ( Pasal 189 ayat (3) )

Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bhawa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan disertai dengan alat bukti yang lainnya. ( Pasal 189 ayat (4) )

Selama pemeriksaan sidang,jika Terdakwa tidak ditahan Pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapannya untuk menahan Terdakwa apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu. (Pasal 190 ayat (1) ).

Dalam hal Terdakwa ditahan, Pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapannya untuk membebaskan Terdakwa, jika terdapat alasan cukup untuk itu dengan mengingat ketentuan Pasal 30. (Pasal 190)

Setelah pemeriksaan dianggap selesai, maka Hakim memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum mengajukan “tuntutan pidananya yang selanjutnya Terdakwa penasihat hukumnya diberi kesempatan untuk mengajukan “pembelaan atau pledoi”

Atas pembelaan tersebut, dapat dijawab lagi oleh Penuntut Umum lazimnya dalam praktik tersebut REPLIK, dans elanjutnya bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya selalu mendapat giliran yang terakhir, dalam praktik tersebut DUPLIK.[[93]](#footnote-93)

**d.Tuntutan atau Penuntutan**

Pengertian penuntutan yang diatur pada Pasal 1 butir 7 KUHP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang – Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim sidang pengadilan.

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindakan pidana didaerah hukumnya dengan melimpahkan perkara kepengadilan yang berwenang mengadili. ( Pasal 137 KUHP)

Adapun kewenangan yang berada ditangan Penuntut Umum antara lain :

1. Sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan

* Mengadakan pra penuntutan
* Menerima atau menerima kembali hasil penyelidikan yang lengkap dari penyidik
* Penuntut Umum dapat menuntut perkara demi kepentingan Hukum ( Pasal 76, 77, 78 KUHP )
* Penuntut Umum dapat menghentikan penuntutan dengan surat penetapan ( alasan tidak cukup bukti atau tidak termasuk dalam peristiwa pidana)
* Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang menyiapkan surat dakwaan.

1. Melaksanakan penuntutan di sidang Pengadilan
2. Melaksanakan penetapan Hakim
3. Melaksanakan upaya Hukum
4. Membuat surat dakwaan
5. Menutup perkara demi kepentingan hukum
6. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut Undang – Undang.[[94]](#footnote-94)

**e.Pembelaan atau pledoi**

Setelah Jaksa Penuntut Umum selesai membacakan surat tuntutannya, maka giliran diberikan Hak kepada Terdakwa atau Penasehat Hukumnya untuk mengajukan pembelaan atau pledoi. Pembelaan atau pledoi bertujuan untuk memperoleh Putusan Hakim yang membebeaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ataupun setidak – tidaknya hukuman pidana seringan – ringannya.

Menurut Pasal 182 KUHP, dinyatakan sebagai berikut :

1. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana.
2. Selanjutnya Terdakwa atau penasehat hukum mengajukan pembelaan yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasehat hukumnya selalu mendapat giliran terakhir.
3. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada Hakim Ketua sidang dan tuntutannya kepada pihak yang berkepentingan.

**f.Putusan Hakim**

Putusan hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim didalam persidangan, menentukan pabila dihukum atau tidak si pelaku. Jadi Putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang Hakim dalam memutuskan suatu perkara didalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berdasarkan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan :

“putusan yang diucapkan oleh Hakim karna jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.”[[95]](#footnote-95)

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakan seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai Putusan Hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa :

1. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
2. Tiap putusan pengadilan di tanda tangani oleh ketua serta hakim-hakim yang memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.
3. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawarataan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

**4.Keterangan Para Saksi**

Untuk menimbang dan selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) dipersidangan telah mengajukan beberapa saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi**I** SUDARNO Bin (Alm) SUWANTO **;**di persidangan memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

* Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2012 pukul 03.00 WIB di Lingkungan Bapang RT. 01 RW. 09 Kelurahan Harjosari, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, saksi telah kehilangan barang – barang yang ada diwarung miliknya ;
* Bahwa saksi melihat kejadian tersebut setelah dibangunkan oleh istri saksi yang sebelumnya melihat pintu warung terbuka kemudian membangunkan saksi dan melihat pintu warung terbuka dan ada barang -barang yang hilang :
* Bahwa barang – barang yang hilang antara lain 6 (enam) buah tabung gas kecil berukuran 3 (tiga) kg, rokok, uang sisa penjualan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), deterjen rinso dengan berat 1 (satu) kg sebanyak 3 (tiga) bungkus ;
* Bahwa saksi pada saat itu melihat pintu warung dalam keadaan terbuka dan pengait gemboknya telah rusak :
* Bahwa pada waktu itu kondisi gembok warung sudah terbuka dengan kondisi pengait engsel sudah rusak karena digunting :
* Bahwa terdakwa belum pernah ke warung saksi :
* Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) :
* Bahwa saksi melaporkan kejadian 3 (tiga) hari kemudia ;
* Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa dikantor polisi setelah saksi melaporkan kejadian tersebut lalu beberapa hari kemudian polisi menelpon saksi dan mengatakan bahwa terdakwa telah tertangkap ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bendan dan tidak berkeberatan :

1. Saksi**II** WINARSIH Binti SUNARTO ; di persidangan memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut :

* Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012 pukul 03.00 WIB di Lingkungan Bapang RT. 01 RW. 09 Kelurahan Harjosari, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, saksi telah kehilangan barang-barang yang berada di warung miliknya ;
* Bahwa saksi melihat kejadian tersebut pada saat bangun pukul 03.00 WIB dan melihat pintu warung tersebut terbuka dan ada barang - barang yang hilang ;
* Bahwa barang – barang yang hilang antara lain 6 (enam ) buah tabung gas kecil berukuran 3 (tiga) kg, rokok, uang sisa pejualan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), deterjen rinso dengan berat 1 (satu) kg sebanyak 3 (tiga) bungkus ;
* Bahwa pada saat itu saksi melihat pintu warung dalam keadaan terbuka dan pengait gemboknya telah rusak ;
* Bahwa suami saksi selalu mengunci pintu warung tersebut sebelum menutupnya dengan menggunakan 2 (dua) buah gembok yang ada pada pintu tersebut ;
* Bahwa pada waktu itu kondisi gemboknya sudah terbuka dengan kondisi pengait engsel sudah rusak karena digunting ;
* Bahwa Terdakwa belum pernah ke warung saksi ;
* Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) ;
* Bahwa saksi dan suaminya melaporkan kejadian ini 3 (tiga) hari kemudian;
* Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa di kantor polisi setelah suami saya melaporkan kejadian tersebut lalu beberapa hari kemudian Polisi menelpon suami saya dan mengatakan bahwa telah menangkap Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

1. Saksi**III** KUNARTI Binti (Alm) DASUKI ; saksi hadir di persidangan sehingga keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal 12 Oktober 2012 dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

* Bahwa saksi mengenal Terdakwa ;
* Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian pencurian tersebut ;
* Bahwa saksi tidak tahu siapa korban dan pelaku pencurian tersebut ;
* Bahwa saksi pernah ditawari tabung 6 (enam) buah tabung gas 3 (tiga) kg oleh BN;
* Bahwa BN menawarkan tabung gas tersebut pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2012 pukul 08.00 WIB di kost saksi di Lingkungan Merakrejo Kel.Harjosari Kec.Bawen, Kab. Semarang dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) perbuah akan tetapi barangnya tidak dibawa;
* Bahwa saksi tidak mau membeli tabung gas tersebut karena curiga asal usul tabung gas tersebut ;

Saksi adalah seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indra mereka (mis. penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan) dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian. Seorang saksi yang melihat suatu kejadian secara langsung dikenal juga sebagai saksi mata. Saksi sering dipanggil ke pengadilan untuk memberikan kesaksiannya dalam suatu proses peradilan.

Pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan 27 telah memberikan pembatasan, bahkan menghilangkan kesempatan bagi tersangka/terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan atau saksi alibi karena hanya saksi fakta yang bisa diajukan sebagai saksi menguntungkan.[[96]](#footnote-96)

**5. Keterangan Terdakwa**

Menimbang bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa di Persidangan yang pada pokoknya sebagai beikut :\

* Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012 pukul 02.00 WIB di Ling. Bapang RT.01 RW.09 Kel.Harjosari, Kec. Bawen, Kab. Semarang, Terdakwa mengawasi warung saksi Sudarno ;
* Bahwa Terdakwa mengawasi warung tersebut bersama – sama denga Sdr. DU;
* Bahwa pada saat itu Terdakwa bertugas mengawasi situasi sekitar warung sedangan Sdr. DU merusak pengait kunci gembok yang berada dipintu warung dengan cara menggunting lempengan pengait gembok menggunakan gunting baja, setelah pintu warung berhasil dibuka, Sdr. DU masuk terlebih dahulu kemudian menggambil uang, beras, rokok setelah itu Terdakwa masuk dan mengambil 6 (enam) nuah tabung gas kemudian Terdakwa dan Sdr. DU pulang ke kos Terdakwa ;
* Bahwa Terdakwa mengambil barang – barang antara lain 6 (enam) buah tabung gas kecil berukuran 3 (tiga) kg, rokok, uang sisa penjualan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), deterjen rinso dengan berat 1 (satu) kg sebanyak 3 (tiga) bungkus;
* Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa dan Sdr. DU kemudian membagi 2 (dua) barang - barang tersebut antara lain Terdakwa mendapat uang penjualan sebesar Rp. 200.200,- (dua ratus ribu rupiah) dan 6 (enam) buah tabung gas 3 (tiga) kg dan 1 (satu) bungkus rinso sedangkan sisanya diambil oleh Sdr. DU ;
* Bahwa Terdakwa belum sempat menjual tabung gas tersebut akan tetapi terdakwa pernah menawarkantabung gas tersebut kepada Sdri. Kunarti tidak punya uang untuk membayar tabung gas tersebut ;
* Bahwa Terdakwa menawarkan tabung gas tersebut setelah melakukan pencurian tersebut ;
* Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana sekarang keberadaan Sdr. DU ;
* Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 7 (tujuh) bulan karena kasus pencurian laptop ;

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri (Pasal 189 ayat 1 KUHAP).

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang dihubungkan satu sama lainnya maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

* Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012 sekira pukul 03.00 WIB di Ling. Bapang RT.01 RW,09 Kel. Harjosari, Kec. Bawen, Kab. Semarang saksi SUDARNO tlah kehilangan barang – barang miliknya yang ada di warung ;
* Bahwa benar barang – barang yang hilang antara lain 6 ( enam ) buah tabung gas kecil berukuran 3 ( tiga ) kg, rokok, uang sisa penjualan sebesar Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ), deterjen rinso dengan berat 1 ( satu ) kg sebanyak 3 ( tiga ) bungkus ;
* Bahwa benar Terdakwa sdr. DU pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012 sekira pukul 02.30 WIB di Ling. Bapanh RT.01 RW.09 Kel. Harjosari, Kec. Bawen, Kab. Semarang mengawasi warung milik saksi Sudarno ;
* Bahwa benar pada saat itu Terdakwa bertugas mengawasi situasi sekitar warung sedangkan sdr. DU merusak pengait kunci gembok yang berada di pintu warung dengan cara menggunting lempengan pengait gembok dengan menggunakan gunting baja, setelah pintu berhasil dibuka, sdr. DU masuk terlebih dahulu kemudian mengambil uang, beras dan rokok setalah itu Terdakwa masuk dan mengambil 6 ( enam ) buah tabung gas kemudian Terdakwa dan sdr. DU pulang ke kos Terdakwa ;
* Bahwa benar setalah mengambil barang – barang tersebut, terdakwa dan sdr. DU membagi 2 ( dua ) barang tersebut antara lai n Terdakwa menda[at uang penjualan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 6 (enam) buah tabung gas 3 (tiga) kg dan 1 (satu) bungkus rinso sedangkan sisanya diambil sdr. DU ;
* Bahwa benar Terdakwa pernah menawarkan tabung gas kepada saksi KUNARTI pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012 pukul 08.00 WIB di kost saksi KUNARTI di Ling. Merakrejo, Kel. Harjosari, Kec. Bawen, Kab. Semarang dengan harga Rp. 75.000,- ( tujuh puluh lima ribu rupiah ) perbuah ;
* Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi SUDARNO mengalami kerugian Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) ;
* Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum selama 7 (tujuh) bulan dalam perkara pencurian laptop

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti maka sampailah kepada pembuktian unsur – unsur Tindak Pidana yang didakwakan yaitu Pasal : 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP

Adapun unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;
5. Dilakukan dua orang atau lebih bersama-sama;
6. Untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ad. 1: Barang Siapa;

Menimbang, bahwa u nsur “barang siapa” dalam hukum pidana adalah subyek dari pelaku tindakan pidana yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya yang dilakukan yaitu orang ( si pelaku )

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan bahwa BN alias JABRIK bin SULAIMAN sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan Tindakan Pidana, dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, dan berdasarkan keterangan saksi – saksi lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah ***subyek atau pelaku dari tindak pidana*** yang mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan lebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur – unsur selanjutnya ;

Bahwa disamping itu Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjwabkan perbuatannya dimuka hukum ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang ***( error in personal )*** sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat unsur ke – 1 telah terpenuhi :

Ad. 2 : Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa menurut **R. Soesilo** mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaanya. Menurutnya suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.

Menimbang, bahwa menurut **Mr. J. M. Van Bemmelen** mengartikan mengambil sebagai tindakan yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagaian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaanya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaanya itu.

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama – sama sdr. DU pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012 pukul 02.30 WIB telah mengambil barang – barang milik saksi SUDARNO yang dipajang diwarung miliknya di Ling. Bapang RT. 01 RW.09 , Kel. Harjosari, Kec. Bawen, Kab. Semarang.

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud ( misalnya listrik dan gas ). Barang disini sebenarnya tidak harus selalu memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, barang berwujud tersebut antara lain 6 (enam) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kg, rokok, uang sisa hasil penjualan, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), deterjen rinso dengan berat 1 (satu) kg sebanyak 3 (tiga) bungkus milik saksi korban SUDARNO dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis karena barang tersebut adalah barang yang dapat di perjualbelikan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat terhadap unsur ke – 2 telah terpenuhi

Ad. 3 : Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang perlu dibuktikan ialah siapa pemilik barang yang diambil terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah diperoleh dari keterangan saksi SUDARNO dan saksi WINARSIH bahwa 6 (enam) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kg, rokok, uang sisa hasil penjualan, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), deterjen rinso dengan berat 1 (satu) kg sebanyak 3 (tiga) bungkus tersebut adalah miliknya, bukan milik Terdakwa hal mana dikuatkan karena barang tersebut diambil dari warung miliknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat terhadap unsur ke – 3 telah terpenuhi ;

Ad. 4 : Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat unguk memiliki barang tersebut. Menurut ***Arrest Hoge Raad*** 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau ***Wederrechtelijk*** menurut ahli DR. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H bahwa dalanm teori dan doktrin Hukum Pidana, di kenal sifat melawan hukum objektif dan subjektif, dimana sifat melawan hukum objektif adalah apabila perbuatan bertentangan dengann Peraturan Perundang – Undangan, yang berarti jika tidak ada undang – undang yang dilanggar maka tidak ada pula sifat melawan hukum dan secara mutatis mutandis bukan tindak pidana. sedangkan sifat melawan hukum subjektif adalah apabila perbuatan bertentangan dengan hak orang lain, dalam hal ini termasuk saksi Sudarno dan tanpa dasar hak sendiri / tidak ada dasar hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan pada saat Terdakwa mengambil barang – barang milik saksi SUDARNO seperti tersebut diatas diwarung milik saksi SUDARNO di Ling. Bapang RT.01 RW.09 Kel. Harjosari, Kec. Bawen, Kab. Semarang tanpa ijin saksi korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memang berniat untuk memiliki barang tersebut dan hal itu Terdakwa lakukan secara melawan hukum, karna Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang – barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat terhadap unsur ke – 4 telah terpenuhi

Ad. 5 : Dilakukan dua orang atau lebih bersama-sama

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dimana diantara mereka ada kerjasama secara sadar seperti perwujudan kehendak bersama ketika mereka melakukan tindakan pidana, dan mereka bersama – sama melakukan seluruh atau sebagian dari unsur – unsur tindak pidana tanpa harus mempersoalkan siapa yang melakukan perbuatab akhir sehingga tercipta suatu tindakan pidana yang penting para pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama – sama dengan sdr. DU dan diantaranya keduanya telah ada kerjasama secara sadar dimana Terdakwa bertugas mengawasi situasi sekitar warung sedangkan sdr. DU merusak pengait kunci gembok yang berada dipintu warung ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat terhadap unsur ke – 5 tela terpenuhi.

Ad. 6 : Untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang harus dibuktikan adalah apakah perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraiaan tersebut adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu terbukti maka terpenuhilah unsur dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta Terdakwa dan sdr. DU pada saat akan melakukan perbuatan tersebut terlebih dahulu merusak pengait kunci gembok yang berada dipintu warung yaitu menggunting lempengan pengait gembok menggunakan gunting baja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUDARNO dan saksi WINARSIH bahwa pada saat melihat pintu warung tersebut dalam keadaan terbuka melihat pengait gemboknya telah rusak ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan tersebut Majelis berpendapat terhadap unsur ke – 6 telah terpenuhi ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4, ke – 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar yaitu alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang dapat menghapus kesalahan dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatanya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seuai dengan keselahanya ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah untuk mendidik dan menyadarkan serta mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatanya kembali ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dijatuhkan dalam perkara ini yakni :

* Rinso seberat 1 ( satu ) kg yang sudah dimasukkan dalam botol Aqua besar;
* 1 ( satu ) buah tabung gas 3 ( tiga ) kg dalam keadaan kosong ;
* 2 ( dua ) buah gembok ;
* 2 ( dua ) buah pengait dalam keadaan rusak ;

Bawa berdaarkan fakta – fakta dipersidangan, terhadap barang bukti tersebut merupakan barang – barang milik saksi Sudarno yang ada di warung pada saat Terdakwa mengambilnya shingga harus dikembalikan pada saksi Sudarno ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan pidana, yaitu

Hal – hal yang memberatkan :

* Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
* Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal – hal yang meringankan :

* Terdakwa bersikap sopan saat persidangan ;
* Terdakwa mengakui perbutaannya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penahanan yang dijalani dikurangkan seluruhnya terhadap masa pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa Terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahan yang telah dijalani Terdakwa tersebut maka menurut Pasal 21 (4) KUHP dan Pasal 193 (2) huruf b KUHP, Majelis menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, dan Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

**6. Tuntutan Penuntut Umum**

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dan Terdakwa;

Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambarawa No.Reg.Perk : PDM-141/0.3.42/Epp.2/12/2012 tertanggal 21 Januari 2013 yang pada pokoknya berpendapat agar supaya Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa BN alias JABRIK bun Sulaiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “Pencurian Dalam Keadaan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1), ke-4 ke-5 KUHP sebagaimana terurai dalam surat dakwaan kami tersebut diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BN alias JABRIK bin SULAIMAN dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa kurangi selama ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

3.1. 6 (enam) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg

3.2. 1 (satu) kg Rinso dalam botol

3.3. 2 (dua) buah gembok dan 2 (dua) buah pengaitnya.

4. Menghukum pula untuk membayar biaya perkara Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

**7. Putusan Hakim**

Dalam perkara yang telah dijelaskan diatas maka Hakim Ketua Pengadilan Ungaran yaitu , Zainuri, SH. Memberikan putusan perkara kepada Terdakwa, BN alias JABRIK Bin Sulaiman :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa BN alias JABRIK Bin SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selalma 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

* Rinso seberat 1 (satu) kg yang sudah dimasukkan dalam botol Aqua besar;
* 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg dalam keadaan kosong ;
* 2 (dua) buah gembok ;
* 2 (dua) buah pengait dalam keadaan rusak ;

Dikembalikan kepada saksi SUDARNO ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

**ANALISIS HUKUM**

` Pada kasus Tindak Pidana Pencurian No. 150/Pid.B/2012/PN.Ung. Hakim menngadili terdakwa dengan Pasal 363 ayat (1) ke – 4, ke – 5 KUHP. Kebijakan hakim dalam memutuskan perkara ini diambil dengan bantuan dari alat bukti yang ada berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan pada saat proses persidangan berlangsung, maka hakim memutuskan untuk memberi hukuman berupa 1 tahun penjara terhadap terdakwa.

1. **Kendala–Kendala Yang Dihadapi Dalam Memutuskan Perkara Persidangan dan Langkah Penyelesaiannya**

Dalam memutuskan sebuah perkara dalam persidangan Hakim tentu saja harus dapat menjamin keakuratan (kebenaran) dan keadilannya. Hukum Acara Pidana memiliki tujuan yaitu, menemukan kebenaran materiil menjadi tujuan seluruh tertib Hukum di Indonesia untuk mencapai suatu masyarakat yang tertib, damai tentram sejahtera dan adil.

Pada saat memutus perkara di persidangan tentu saja Hakim memiliki banyak kendala-kendala yang dilalui, berikut kendala – kendalanya :

1. Sulitnya menghadirkan alat bukti (Saksi)

Dalam persidangan saksi sangat penting dalam suatu pemeriksaan suatu kasus Pidana, akan tetapi dalam proses persidangan terkadang saksi sulit untuk dihadirkan karena tidak memenuhi undangan yang sudah dikirimkan dan dijadwalkan oleh Pengadilan.

1. Terdakwa sulit diajak untuk bekerja sama

Dalam suatu proses persidangan Terdakwa sulit untuk diajak untuk berkomunikasi, memilih untuk diam tidak memberikan penjelasan atau keterangan terkait dengan permasalahan dalam persidangan.[[97]](#footnote-97)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | KENDALA | SOLUSI |
| 1 | Saksi yang tidak hadir dalam persidangan. | Diperlukan upaya pemanggilan ulang kepada saksi-saksi dan menjadwalkan ulang persidangan. |
| 2 | Terdakwa sulit untuk diajak berkomunilasi, tidak mau memberikan keterangan. | Hakim / JPU harus sabar dan berusaha atau memberi waktu kepada Terdakwa hingga Terdakwa siap untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim / JPU. Sesuai bunyi Pasal 5 UU N0. 48 Tahun 2009 Kehakiman disebutkan hakim dan hakim konstitusi   1. Wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 2. Harus memiliki intergritas dan keperibadian yang tidak tercela, jujur, adil, profersional, dan berpengalaman dibidang hukum. 3. Wajib menaati Kode Etik fan pedoman Perilaku Hukum.[[98]](#footnote-98) |

# 

# BAB IV

# PENUTUP

### A. Kesimpulan

### Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

### Hukum Tindak Pidana Positif saat ini diatur dan dijelaskan dalam Pasal 362 – 367 KUHPidana.

### Pada perkara Nomor 150/Pid.B/2012/PN.Ung penyerahan berkas kepada ketua pengadilan, meliputi : Penuntut Umum, Ketua Pengadilan, lalu ketua pengadilan menentukan hakim yang akan menangani persidangan dan memutuskan perkara tindak pidana pencurian tersebut lalu setelah itu hakim menentukan hari sidang. Berdasarkan pemeriksaan dipersidangan hakim menerapkan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana adapun penerapan hukumnya telah sesuai dengan ketentuan pidana materiil yang berlaku dan syarat dapat dipidananya terdakwa, hal ini didasarkan pada alat bukti yang ada berupa keterangan saksi, keterangan para ahli, barang bukti yang ada dan juga keterangan dari terdakwa yang telah mengakui perbuatannya dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka terdakwa dianggap mampu mempertanggungjwabkan perbuatannya.Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor , 150/Pid.B/2012/PN.Ungtelah sesuai dengan terpenuhinya unsur – unsur yang ada dalam dakwaan tunggal pasal 3636 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, adapun unsur – unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP adalah sebagai berikut :

### Barang siapa;

### Mengambil suatu barang;

### Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

### Dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum;

### Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama – sama;

### Untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

### Pada kasus No. 150/Pid.B./2012/PN.Ung hakim memutus tedakwa dengan Pasal 363 KUHP dengan pidana penjara 1 tahun, sedangkan dilihat dari hal yang memberatkan terdakwa pernah dipidana dengan kasus yang sama maka seharusnya Terdakwa dipidana lebih dari 1tahun.

### Kendala – kendala yang dihadapi oleh Hakim Pengadilan Negeri Ungaran dalam memutuskan perkara tindak pidana pencurian di Kab. Semarang yaitu alat bukti ( saksi ) yang sulit untuk di datangkan atau tidak memenuhi undangan yang sudah dijadwalkan, dan Terdakwa yang sulit untuk diajak berkomunikasi pada saat persidangan berlangsung, terdakwa lebih memilih untuk banyak diam dan tidak memberikan keterangan.

### B. Saran

### Melihat semakin banyaknya kasus pencurian yang terjadi disekitar, maka untuk mengurangi tindakan kejahatan tersebut diharapkan pemerintah dapat meningkatkan taraf kehidupan ekonomi, memperbaiki perekonomian masyarakat kecil, dengan cara membuka peluang kerja yang lebih banyak dan mudah, atau dengan cara meminjamkan uang dibank dengan jaminan sebagai modal usaha kecil – kecilan.

### Penambahan jam portal atau penjaga siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan) pada malam hari agar mengurangi tindak kejahatan didaerah sekitar.

### Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak kejahatan harus dilakukan tindakan yang tegas, adil tanpa tebang pilih terhadap kedudukan sosial dan ekonomi seseorang. Jika seseorang telah melakukan tindak pidana untuk yang kesekian kalinya maka hukuman yang diberikan harus lebih berat atau setara agar memberikan rasa jera.

**DAFTAR PUSTAKA**

AL – QUR’AN dan Terjemahannya

Hadist - Hadist

**Buku – Buku :**

A Khisni, *Essay-Essay Aliran Pemikiran dalam Hukum Islam*, Unisssula Perss

Achmad Ali, 2008, *Menguak Takbir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta

Andi Hamzah, *2008, Hukum Acara Pidana Indonesia,* Edisi Kedua Sinar Grafika

Andi Hamzah, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Bambang Poernomo,1994 ,*Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta,

Bambang Waloyu, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta

Brada Nawawi Arief, 2008, Bunga Rampai, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Semarang

Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama

Evi Hartanti, 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta

J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta

Laden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

Lamintang, 2009, *Delik- Delik Kasus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta,

Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan,* Mandar Maju

Marsiyem, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Unissula Pers, semarang

Moeljatno, 2008*, Azaz – Azaz Hukum Pidana,* Rineka Cipta, Jakarta

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penulisan hukum Normatif dan Empir*is, Pustaka pelajar, Yogyakarta

R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta

Rahmat Rosyadi, Rais Ahmad, 2006, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor

Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Sudarto, 2009, *Hukum Pidana 1*, Semarang, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, cetakan III

Sugiyono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana Edisi 1,* PT. Raja Grafindo Persada, jakarta

Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta

**Peraturan Perundang – Undangan :**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

**Jurnal Ilmiah:**

[www.jurnal.fh.unila.ac.id//Ridlawn](http://www.jurnal.fh.unila.ac.id//Ridlawn)FIAT JUSTITIA Ilmu Hukum Volume 5 No.2 02 Mei-Agustus 2012,Hlm 123

Kartonegoto, 1999, *Diktat Kuliah Hukum Pidana,* Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta

**Internet:**

<https://www.eduspensa.id/hukum/#1_Secara_umum>

https://id.wikipedia.org/wiki/Elpiji

<http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-maidah-ayat-38-40.html>

<http://jogja.tribunnews.com/2017/10/18/sempat-dimassa-pencuri-tabung-gas-ini-akhirnya-diamankan-polisi>

<http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6944/perbedaan-unsur-bersekutu-dalam-pasal-365-kuhp-dengan-penyertaan-dalam-pasal-55-kuhp>

<http://nurlaela46sari.blogspot.co.id/2012/11/unsur-unsur-pasal-dalam-hukum-pidana.html>

[http://frymasonanta.blogspot.co.id/2013/04/kejahatan -terhadap-harta-kekayaan.html](http://frymasonanta.blogspot.co.id/2013/04/kejahatan%20-terhadap-harta-kekayaan.html)

http://rahmanamin1984.blogspot.com/2015/05/teori-teori-pemidanaan-dalam-hukum.html <https://id.wikipedia.org/wiki/Elpiji#Sifat_elpiji>

<http://www.alifmh-shagir.com/2017/02/Gas-LPG-Liquified-Petroleum-Gas-Pengertian-Sifat-Macam-dan-Jenis-Gas-LPG-serta-Penggunaannya.html>

<http://digilib.unila.ac.id/11291/11/II.%20LANDASAN%20TEORI.pdf>

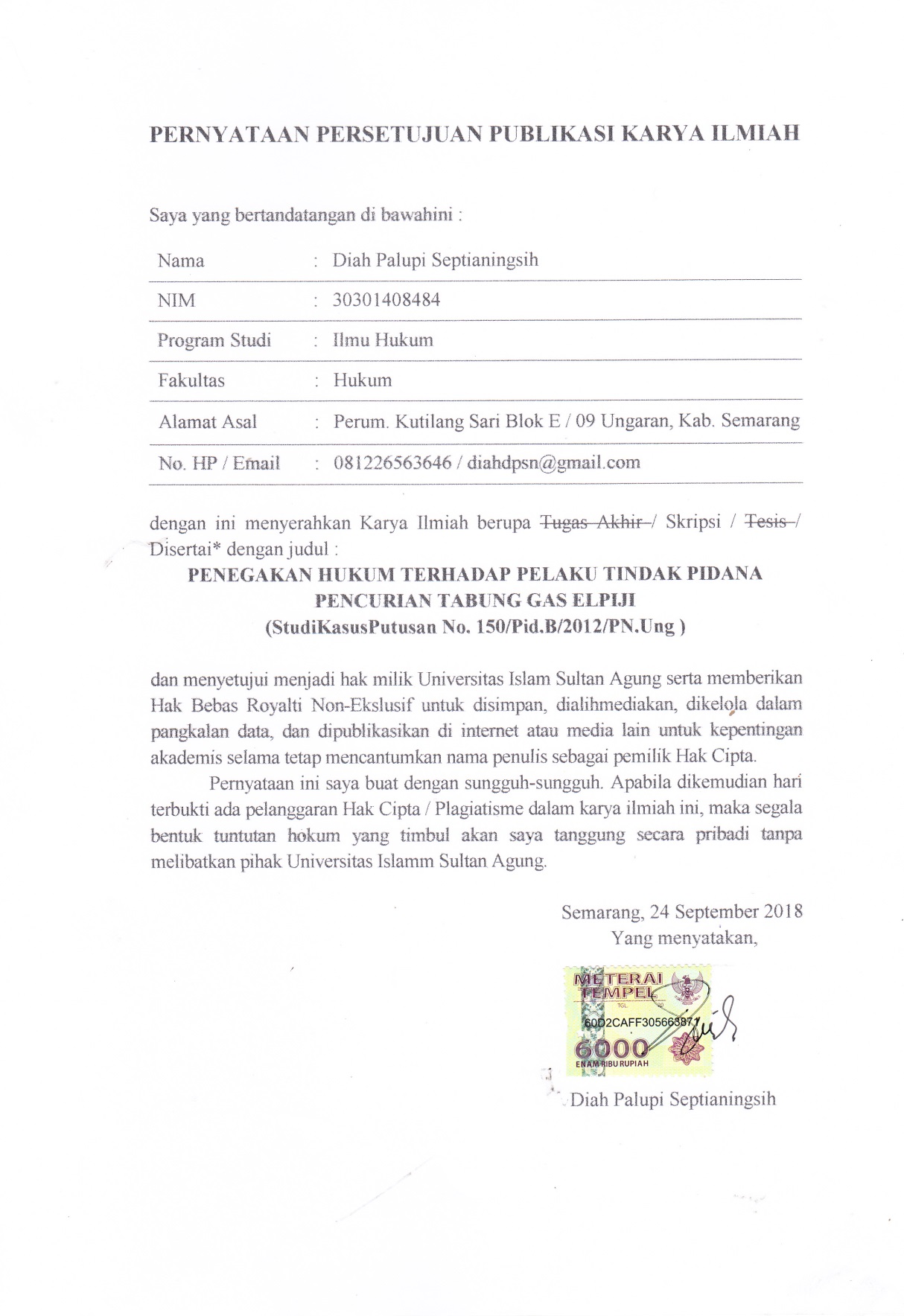
[www.pn-ungaran.go.id](http://www.pn-ungaran.go.id)

<http://aliranim.blogspot.com/2009/12/surat-dakwaan-pengertian-surat-dakwaan.html>

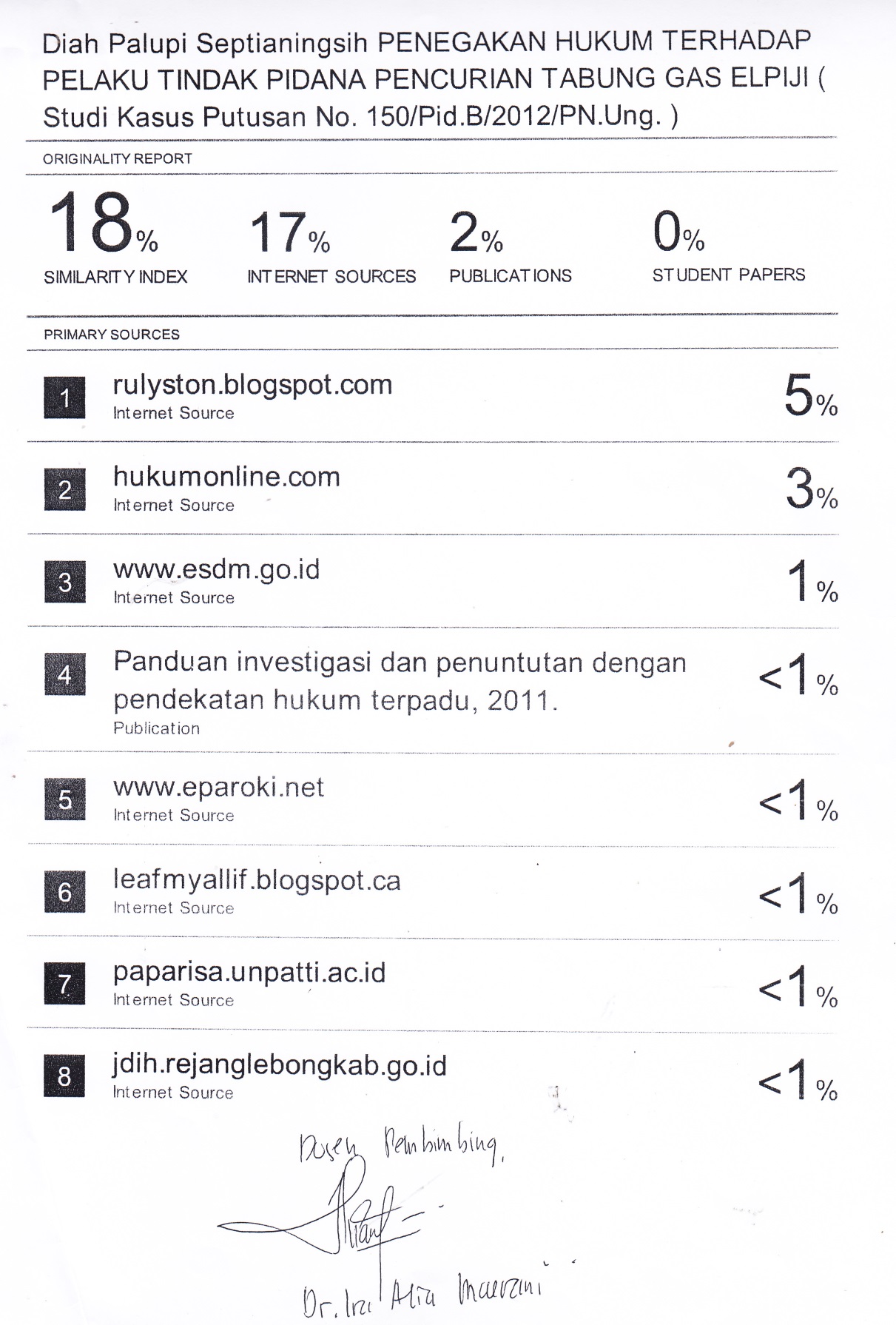
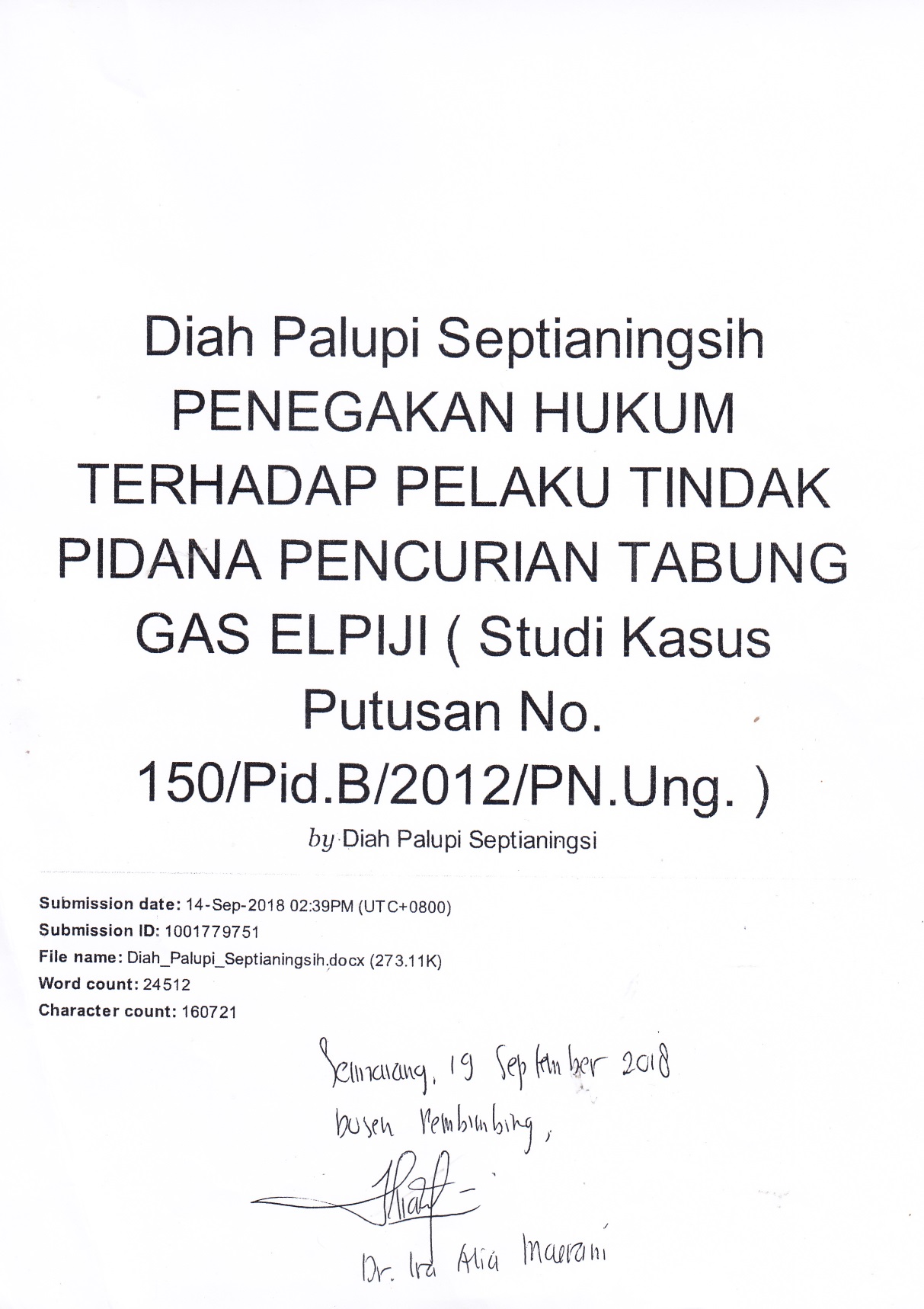
WAWANCARA :

Wawancara Pribadi dengan Hakim Anggota Pengadilan Ungaran Wasis Priyanto, S.H., M.H,

**LAMPIRAN**







1. Pasal 1 Ayat (3) UUD Tahun 1945 [↑](#footnote-ref-1)
2. [www.jurnal.fh.unila.ac.id//Ridlawn](http://www.jurnal.fh.unila.ac.id//Ridlawn) 2014,FIAT JUSTITIA Ilmu Hukum Volume 5 No.2 02 Mei-Agustus 2012,Hlm 123 (diakses tanggal 14 Maret 2018, pukul 19.51 WIB) [↑](#footnote-ref-2)
3. Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 30 [↑](#footnote-ref-3)
4. Moeljatno, 2008, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 1 [↑](#footnote-ref-4)
5. R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm 1 [↑](#footnote-ref-5)
6. Bambang Waloyu, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 1 [↑](#footnote-ref-6)
7. QS. Al-Maa-idah: 38-40 [↑](#footnote-ref-7)
8. <http://jogja.tribunnews.com/2017/10/18/sempat-dimassa-pencuri-tabung-gas-ini-akhirnya-diamankan-polisi>(diakses tanggal 17 Maret 2018, pukul 16.08) [↑](#footnote-ref-8)
9. <http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20II> (diakses tanggal 18 Maret 2018, Pukul 19.02 ) [↑](#footnote-ref-9)
10. <https://www.eduspensa.id/hukum/#1_Secara_umum> (diakses tanggal 18 Maret 2018, Pukul 19.10 ) [↑](#footnote-ref-10)
11. <https://id.wikipedia.org/wiki/Elpiji> (diakses 18 Maret 2018, Pukul 19.27 ) [↑](#footnote-ref-11)
12. <https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_negeri>( diakses tanggal 18 Maret 2018, Pukul 19.40 ) [↑](#footnote-ref-12)
13. Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 43 [↑](#footnote-ref-13)
14. J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 2 [↑](#footnote-ref-14)
15. Sugiyono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hlm 62 [↑](#footnote-ref-15)
16. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penulisan hukum Normatif dan Empir*is, Pustaka pelajar, Yogyakarta, hlm 157 [↑](#footnote-ref-16)
17. Sudarto, 2009, *Hukum Pidana 1*, Semarang, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, cetakan III, Hlm 64 [↑](#footnote-ref-17)
18. Bambang Poernomo,1994 ,*Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 90 [↑](#footnote-ref-18)
19. Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hlm 67 [↑](#footnote-ref-19)
20. Kartonegoto, 1999, *Diktat Kuliah Hukum Pidana,* Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, Hlm 62 [↑](#footnote-ref-20)
21. Laden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 7 [↑](#footnote-ref-21)
22. Andi Hamzah, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm 96 [↑](#footnote-ref-22)
23. Leden Marpaung, *Loc-Cit*, Hlm 7-8 [↑](#footnote-ref-23)
24. Sudarto, *Loc-Cit*, Hlm 67-70 [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibid*, Hlm 72-73 [↑](#footnote-ref-25)
26. P.A.F Lamintang*, 1996, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Adhitya Bakti. Bandung, Hlm 7 [↑](#footnote-ref-26)
27. <http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html>(diakses tanggal 2 Maret 2018, pukul 12.43) [↑](#footnote-ref-27)
28. Brada Nawawi Arief, 2008, Bunga Rampai, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Semarang, Hlm 84 [↑](#footnote-ref-28)
29. Marsiyem, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Unissula Pers, Semarang, Hlm 36. [↑](#footnote-ref-29)
30. Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hlm 112-116 [↑](#footnote-ref-30)
31. Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 347 [↑](#footnote-ref-31)
32. C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil*, Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm 40 [↑](#footnote-ref-32)
33. Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hlm 116-117 [↑](#footnote-ref-33)
34. C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Op.Cit*, Hlm 41 [↑](#footnote-ref-34)
35. Adami Chazawi, *Op.Cit,* Hlm 123 [↑](#footnote-ref-35)
36. *Ibid*, Hlm 126-130 [↑](#footnote-ref-36)
37. R. Abdoel Djamali, *Op-Cit,* Hlm 175 [↑](#footnote-ref-37)
38. P.A.F, Lamintang, *Op.Cit*, Hlm 192-193 [↑](#footnote-ref-38)
39. Laden Marpaung, *Op.Cit,*  Hlm 11 [↑](#footnote-ref-39)
40. Adami Chazawi, *Op.Cit* Hlm 79-80 [↑](#footnote-ref-40)
41. *Ibid*, Hlm 82-83 [↑](#footnote-ref-41)
42. Moeljatno, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, Hlm 128 [↑](#footnote-ref-42)
43. Adami Chazawi,2004, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang , Hlm 5 [↑](#footnote-ref-43)
44. Lamintang, 2009, *Delik- Delik Kasus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 13 [↑](#footnote-ref-44)
45. Lamintang dan Siromagkir, C, 1979, *Delik-Delik Kasus Kejahatan Yang Di Tunjukan Terhadap Hak Milik Dan Lain Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung, Hlm 15 [↑](#footnote-ref-45)
46. Lamintang, *Op.Cit*, Hlm 54 [↑](#footnote-ref-46)
47. http://raypratama.blogspot.com/2012/02/tindak-pidana-kekerasan-dan-jenis.html (diakses tanggal 13 April 2018 pukul 12.21 WIB) [↑](#footnote-ref-47)
48. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6944/perbedaan-unsur-bersekutu-dalam-pasal-365-kuhp-dengan-penyertaan-dalam-pasal-55-kuhp>(diakses tanggal 13 April 2018, pukul 12.38 WIB) [↑](#footnote-ref-48)
49. <http://nurlaela46sari.blogspot.co.id/2012/11/unsur-unsur-pasal-dalam-hukum-pidana.html>(diakses tanggal 13 April 2018, pukul 12.44 WIB) [↑](#footnote-ref-49)
50. [http://frymasonanta.blogspot.co.id/2013/04/kejahatan -terhadap-harta-kekayaan.html](http://frymasonanta.blogspot.co.id/2013/04/kejahatan%20-terhadap-harta-kekayaan.html)(diakses tanggal 13 April 2018, pukul 13.20WIB) [↑](#footnote-ref-50)
51. Leden Marpaung, *Op.Cit*, Hlm 2 [↑](#footnote-ref-51)
52. Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana Edisi 1,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 14 [↑](#footnote-ref-52)
53. Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, Hlm 22 [↑](#footnote-ref-53)
54. Andi Hamzah. *,Op.Cit*, Hlm 31 [↑](#footnote-ref-54)
55. H.B. Vos, Leerboek Van Nerderlands Strafrecht, Haarlem; H.D. Tjeenk Willink, 1950, Hlm. 10 [↑](#footnote-ref-55)
56. Evi Hartanti, 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 60 [↑](#footnote-ref-56)
57. Andi Hamzah, *Op.Cit*, Hlm 34 [↑](#footnote-ref-57)
58. Evi Hartanti, *Op.Cit*, Hlm 61-62 [↑](#footnote-ref-58)
59. http://rahmanamin1984.blogspot.com/2015/05/teori-teori-pemidanaan-dalam-hukum.html (diakses tanggal 19 April 2018, pukul 16.31 WIB) [↑](#footnote-ref-59)
60. Teguh Prasetyo,*Op.Cit,* Hlm 117 [↑](#footnote-ref-60)
61. *Ibid*, Hlm 120-123 [↑](#footnote-ref-61)
62. Evi Hartati SH, *Op.Cit*, Hlm 58-59 [↑](#footnote-ref-62)
63. [https://id.wikipedia.org/wiki/Elpiji#Sifat\_elpiji](https://id.wikipedia.org/wiki/Elpiji" \l "Sifat_elpiji)(diakses tanggal 12 April 2018, pukul 23.57 WIB) [↑](#footnote-ref-63)
64. <http://liguifiedpetroleumgas.blogspot.co.id/> (diakses tanggal 14 April 2018, pukul 00.01 WIB) [↑](#footnote-ref-64)
65. <http://www.alifmh-shagir.com/2017/02/Gas-LPG-Liquified-Petroleum-Gas-Pengertian-Sifat-Macam-dan-Jenis-Gas-LPG-serta-Penggunaannya.html> (diakses tanggal 12 April 2018, pukul 00.21 WIB) [↑](#footnote-ref-65)
66. <http://pusdiklatmigas.esdm.go.id/file/t2-_LPG_---_M_hasan_Syukur.pdf> (diakses tanggal 14 April 2018, pukul 00.26 WIB) [↑](#footnote-ref-66)
67. <http://www.alifmh-shagir.com/2017/02/Gas-LPG-Liquified-Petroleum-Gas-Pengertian-Sifat-Macam-dan-Jenis-Gas-LPG-serta-Penggunaannya.html> (diakses tanggal 14 April 2018, pukul 00.39 WIB) [↑](#footnote-ref-67)
68. <http://digilib.unila.ac.id/11291/11/II.%20LANDASAN%20TEORI.pdf> (diakses tanggal 14 April 2018, pukul 01.07 WIB) [↑](#footnote-ref-68)
69. A Khisni, *Essay-Essay Aliran Pemikiran dalam Hukum Islam*, Unisssula Perss, Hlm 83 [↑](#footnote-ref-69)
70. *Ibid*, Hlm 89 [↑](#footnote-ref-70)
71. QS An-Nisa ayat 59 [↑](#footnote-ref-71)
72. Nurul Irfan & Masyrofah,2015, *Fiqih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 99-100 [↑](#footnote-ref-72)
73. QS Al-Maidah ayat 38 [↑](#footnote-ref-73)
74. Rahmat Rosyadi, Rais Ahmad, 2006, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, Hlm 134-136 [↑](#footnote-ref-74)
75. QS Al-Maidah ayat 39 [↑](#footnote-ref-75)
76. Pasal 362 KUHP. [↑](#footnote-ref-76)
77. Pasal 363 KUHP [↑](#footnote-ref-77)
78. Pasal 364 KUHP [↑](#footnote-ref-78)
79. Pasal 365 KUHP [↑](#footnote-ref-79)
80. Pasal 366 KUHP [↑](#footnote-ref-80)
81. Pasal 367 KUHP [↑](#footnote-ref-81)
82. <http://aliranim.blogspot.com/2009/12/surat-dakwaan-pengertian-surat-dakwaan.html>( diakses tanggal 3 Juli 2018, pukul 17.25 ) [↑](#footnote-ref-82)
83. Andi Hamzah, *2008, Hukum Acara Pidana Indonesia,* Edisi Kedua Sinar Grafika, Hlm 75 [↑](#footnote-ref-83)
84. [www.pn-ungaran.go.id](http://www.pn-ungaran.go.id) (diakses tanggal 15 Juli 2018 pukul 15.19 WIB ) [↑](#footnote-ref-84)
85. Andi Hamzah, 1996, *KUHP dan KUHAP, R*ineka Cipta, Jakarta, Hlm 101 [↑](#footnote-ref-85)
86. Nanda Agung Dewantoro, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana,* Aksara Persada, Jakarta, Hlm 149 [↑](#footnote-ref-86)
87. Pasal 152 ayat 1 KUHP [↑](#footnote-ref-87)
88. Pasal 152 ayat 2 KUHP [↑](#footnote-ref-88)
89. Andi Hamzah, *Op- Cit*, hlm 167 [↑](#footnote-ref-89)
90. <https://seniorkampus.blogspot.com/2014/07/pembacaan-surat-dakwaan.html> ( diakses tanggal 7 Juli 2018, pukul 17.40 ) [↑](#footnote-ref-90)
91. Andi Hamzah, *Op- Cit*, Hlm 162 [↑](#footnote-ref-91)
92. Ibid, Hlm 260 [↑](#footnote-ref-92)
93. <http://pesonailmuhukum.wordpress.com/2014/12/10/hukum-acara-pidana/> (diakses tanggal 12 Juli 2018 pukul 22.26 WIB ) [↑](#footnote-ref-93)
94. <https://personalmuhukum.wordpress.com/2014/12/10/hukum-acara-pidana/> (diakses tanggal 15 Juli 2018 pukul 15.50) [↑](#footnote-ref-94)
95. Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan,* Mandar Maju, Hlm 127 [↑](#footnote-ref-95)
96. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e400c35027d0/mk-definisi-saksi-dalam-kuhap--> (diakses tanggal 13 Mei 2018, pukul 17.15) [↑](#footnote-ref-96)
97. Wawancara Pribadi dengan Hakim Anggota Pengadilan Ungaran Wasis Priyanto, S.H., M.H, tanggal 12 April 2018, pukul 09.00 WIB [↑](#footnote-ref-97)
98. Pasal 5 UU N0. 48 Tahun 2009 UU Kehakiman [↑](#footnote-ref-98)